



KKP
2025
#RISETOGETHER

LAPORAN KINERJA



PREPARED BY :

**PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BITUNG**



**TAHUN
2025**



BITUNG



HUMAS PPS BITUNG



HUMAS PPS BITUNG



#MARI JO TORANG KA PPS BITUNG

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS) Bitung ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPS Bitung selama periode Tahun 2025. Didalamnya memuat capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan serta evaluasi atas kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Laporan ini juga menjadi dasar dalam menyusun rencana tindak lanjut dan upaya perbaikan yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal pada triwulan berikutnya.

Penyusunan laporan ini berdasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku, antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), yang menjadi dasar utama dalam pengelolaan pelaporan kinerja secara sistematis dan terukur;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang turut mempengaruhi evaluasi dan penyesuaian indikator kinerja belanja.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, PPS Bitung memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan pelabuhan perikanan secara berkelanjutan, efisien dan bertanggungjawab serta sebagai salah satu pelaksana dalam mendukung Program Prioritas Penangkapan Ikan Terukur dan Penerapan PNBP Pasca Produksi di lingkup Pelabuhan Perikanan. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program kerja mendukung pencapaian strategis instansi serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sektor perikanan nasional khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi antara Kepala PPS Bitung, Ketua Tim Kerja dan seluruh jajaran pegawai serta berbagai pihak baik dari internal maupun dari eksternal. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi dalam pencapaian kinerja PPS Bitung selama Triwulan III ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap masukan, kritik membangun dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan laporan ini ke depannya.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola kelembagaan serta pencapaian kinerja PPS Bitung pada masa yang akan datang

Bitung, 22 Januari 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung



Makkasay A.Pi, M.Si

NIP. 197212021998031003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
KILAS CAPAIAN PPS BITUNG	4
PENDAHULUAN	7
Latar Belakang	7
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	9
Komposisi Pegawai	10
Isu Strategis	11
Sistematika Pelaporan	13
PERENCANAAN KINERJA	15
Tujuan dan Sasaran	15
Target Kinerja dan Anggaran	17



	Rencana Aksi Penetapan Kinerja	19
	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	Capaian Kinerja Organisasi	23
	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
	Akuntabilitas Keuangan	77
	PENUTUP	78
	Kesimpulan	78
	Saran	79
	Tindaklanjut atas saran pada LKJ TW III Tahun 2025	79
	Lampiran	81
		
		
		
		
		
		
		
		
		



DAFTAR TABEL



Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2025	2
Tabel 2. Penempatan Pegawai di PPS Bitung Tahun 2025	11
Tabel 3. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja dan Target PPS Bitung Tahun 2025	18
Tabel 4. Rencana Aksi Penetaan Kinerja PPS Bitung Tahun 2025	20
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2025	24
Tabel 6. Capaian Penerimaan PNPB Non SDA tahun 2025	27
Tabel 7. Capaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung Tahun 2025	32
Tabel 8. Capaian Tingkat Kinerja PPS Bitung tahun 2025	40
Tabel 9. Capaian IK Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Bitung Tahun 2025	48
Tabel 10. Capaian IK Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan di PPS Bitung PPS Bitung Tahun 2025	51
Tabel 11. . Capaian IK Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan pada Tahun 2025	53
Tabel 12. Nilai, Predikat dan Kategori Pengukuran SAKIP	59
Tabel 13. Nilai PM SAKIP lingkup Satker DJPT Tahun 2025	60
Tabel 14. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025	62



Tabel 15. Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung tahun 2025	66
Tabel 16. Capaian IKU Persentase Pengelolaan BMN di PPS Bitung tahun 2025	68
Tabel 17. Capaian IK Nilai IKPA PPS Bitung Tahun 2025	70
Tabel 18. Pembobotan pada indikator NKPA	72
Tabel 19. Realisasi Anggaran PPS Bitung Tahun 2025 Per Kegiatan	77



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerja PPS Bitung Tahun 2025	3
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bitung	10
Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerja PPS Bitung Tahun 2025	23
Gambar 4. Pembinaan pelayanan perusahaan kepada petugas pelayanan	30
Gambar 5. Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan tanah dan bangunan/kios dan monitoring penumpukan barang di PPS Bitung	31
Gambar 6. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Tanah dan Bangunan/Kios Pesisir	31
Gambar 7. Monitoring Penggunaan Tanah di PPS Bitung	38
Gambar 8. Monitoring Pelayanan TPI Higienis dan Kegiatan Forum Konsultasi Publik di PPS Bitung	39
Gambar 9. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran Mendukung PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur	44
Gambar 10. Sosialisasi Modeling Pembongkaran Ikan di PPS Bitung	45
Gambar 11. Gerai Perizinan Kapal Perikanan di PPS Bitung	45
Gambar 12. Rapat Koordinasi Kesyahbandaran di PPS Bitung	45
Gambar 13. Kegiatan Evaluasi Pegawai dan Capacity Building mendukung Pelaksanaan Obvitnas di PPS Bitung	65



Gambar 14. Capaian IK nilai kinerja perencanaan PPS Bitung Tahun 2025	72
Gambar 15. Capaian IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung Tahun 2025	74
Gambar 16. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat TW IV Tahun 2025 di PPS Bitung	76



DAFTAR GRAFIK



Grafik 1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bitung tahun 2024 dan 2025	28
Grafik 2. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung tahun 2024 dan 2025	33
Grafik 3. Perbandingan Tingkat Kinerja PPS Bitung Tahun 2024 dan 2025	40



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja PPS Bitung Triwulan III tahun 2025 berisikan tentang capaian kinerja serta kendala yang dihadapi selama bulan Juli hingga September 2025 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) PPS Bitung tahun 2025.

Laporan kinerja PPS Bitung Triwulan III tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja PPS Bitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAKIP) [http:// www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

Kinerja PPS Bitung tahun 2025 terdiri dari 5 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja yang terbagi dalam 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terdapat 8 indikator kinerja yang terdiri dari 5 IKU dan 3 IKM yang dilakukan penilaiannya pada triwulan III tahun 2025. Dari 8 indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya pada TW III, memiliki capaian yang lebih besar daripada target yang telah ditentukan di awal perencanaan. Terdapat 6 indikator kinerja yang mendapatkan predikat istimewa (berwarna biru) dengan persentase capaian antara 110-120% sedangkan 2 indikator kinerja lainnya mendapatkan predikat baik (berwarna hijau) dengan persentase capaian antara 90-<110%. Untuk lebih jelas terkait dengan capaian indikator kinerja PPS Bitung TW III tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target TW III	Capaian TW III	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	1.793,709	3.699,125	120,00
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat	02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (ton)	30.000	62.968,84	120,00
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal dan Bertanggung Jawab	04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	86	98	113,95
		07	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	50,00	90,22	120,00
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	08	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	925	986	106,59
5	Terwujudnya Layanan Dukungan manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	85	100	117,65
		14	Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	76	100	120,00
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	88,50	92,84	104,90

Nilai Kinerja Organisasi/NKO PPS Bitung tahun 2025 pada aplikasi kinerjaku sebesar 115,23 atau berpredikat istimewa. Nilai kinerja organisasi dari aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerja PPS Bitung Tahun ;2025

Alokasi anggaran PPS Bitung pada tahun 2025 sebesar Rp69.131.426.000,- yang terbagi menjadi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp56.187.377.000,- (81,28%) serta anggaran untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp12.944.049.000,- (18,72%). Dalam pelaksanaannya terbit Instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dimana setelah dilakukan perhitungan, PPS Bitung mendapatkan alokasi efisiensi anggaran sebesar Rp3.396.446.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp65.734.980.000,-. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari januari sampai dengan september 2025, telah terealisasi anggaran sebesar 9.032.696.477,- (13,64%).

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran PPS Bitung sebagai salah satu UPT DJPT yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang perikanan tangkap serta dalam rangka menindaklanjuti arahan MKP terkait pelaksanaan Program Ekonomi Biru dimana salah satunya terkait dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP pasca produksi, perlu dilakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sarpras yang ada di PPS Bitung serta melakukan peningkatan kapasitas SDM pegawai PPS Bitung.



KILAS CAPAIAN PPS BITUNG



Nilai Kinerja Organisasi
115,23

PREDIKAT **ISTIMEWA**

1 PENERIMAAN PNBPNON SDA

CAPAIAN

4.850,97

TARGET

2.391,629

**VOLUME PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP**

2

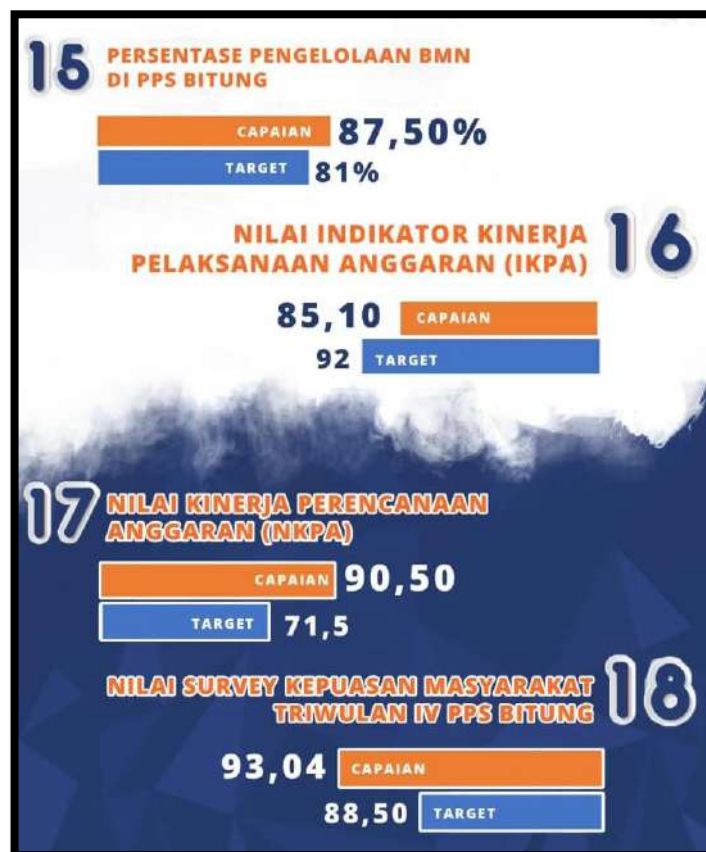
88.655,50

CAPAIAN

51.000

TARGET







BAB I

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung merupakan salah satu pilar utama dalam infrastruktur perikanan nasional, yang berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan ekonomi maritim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan Indonesia timur. Sebagai pelabuhan perikanan tipe A di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPS Bitung berfungsi sebagai pusat pelayanan kapal perikanan, tempat pendaratan hasil tangkapan, pengelolaan fasilitas pelabuhan, serta pendukung kebijakan nasional di bidang perikanan tangkap dan logistik hasil perikanan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui pengukuran capaian kinerja yang berdasarkan pada perencanaan strategis dan indikator yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperkuat dengan hadirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja. Regulasi ini menegaskan pentingnya pengelolaan kinerja yang sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil (outcome), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan. Peraturan Menteri KP ini juga mendorong adanya sinergi antara unit kerja di lingkungan KKP dalam mewujudkan tata kelola



pemerintahan yang baik (good governance) dan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Lebih dari itu, pelaksanaan tugas PPS Bitung juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam cita keempat, yaitu *"Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif dan ekonomi digital, serta ekonomi hijau"* dan cita ketujuh, yaitu *"Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan"*. Melalui penguatan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan, pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, peningkatan pelayanan pelabuhan, dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi, PPS Bitung diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan yang inklusif dan berkeadilan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan visi misi pembangunan nasional, laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPS Bitung atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Laporan ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara obyektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja PPS Bitung Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

1. Menyampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja;
2. Mendukung pelaksanaan SAKIP dan pengelolaan kinerja berbasis hasil sebagaimana diamanatkan dalam Permen KP Nomor 35 Tahun 2023;
3. Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan;
4. Memperkuat akuntabilitas public atas pemanfaatan anggaran, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki PPS Bitung;
5. Memberikan informasi kinerja yang dapat digunakan oleh pimpinan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan lanjutan.

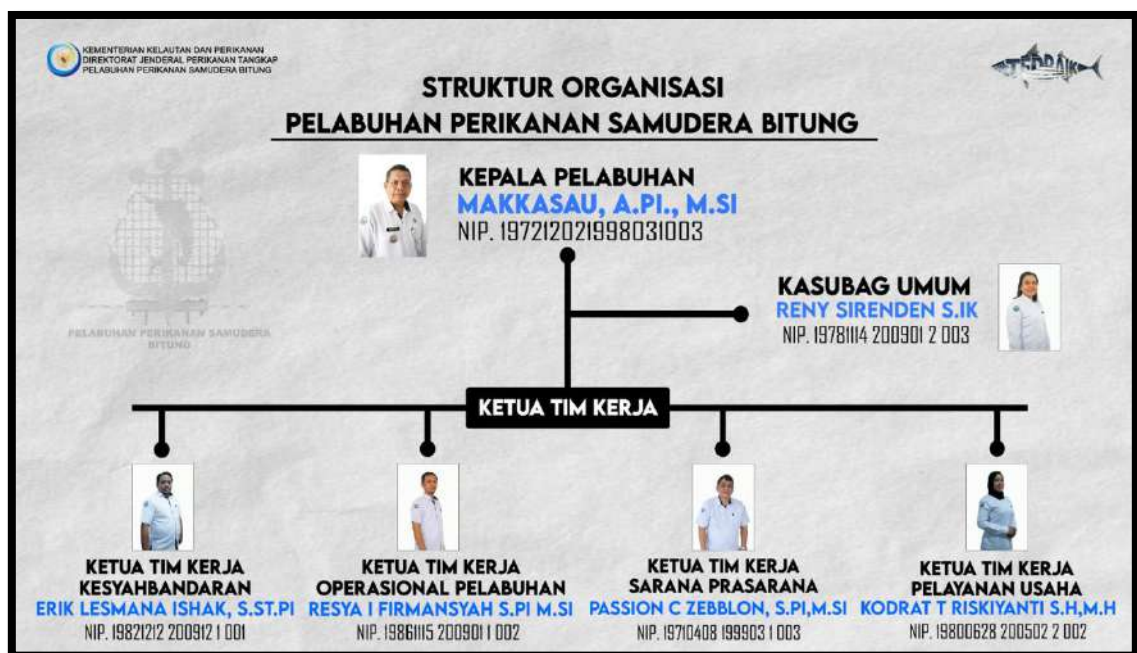
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

PPS Bitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas yang diemban PPS Bitung adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPS Bitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa. pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi PPS Bitung terdiri atas 2 jabatan struktural yaitu Kepala Pelabuhan dan Kepala Subbagian Umum. Selain itu juga terdapat kelompok jabatan fungsional. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur organisasi yang ada di PPS Bitung dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bitung

KOMPOSISI PEGAWAI

Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di PPS Bitung pada Tahun 2025 sebanyak 71 orang

terdiri dari 49 ASN (33 PNS dan 16 P3K), 15 PPNNP serta 7 orang PJLP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Penempatan Pegawai di PPS Bitung Tahun 2025

Penempatan	ASN	PPNNP	PJLP	Jumlah
Kepala Pelabuhan	1	-	-	1
Subbagian Umum	16	3	2	21
Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	22	1	-	23
Bidang Tata Kelola dan Sarana Prasarana	10	11	5	26
Jumlah	49	15	7	71

ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung menghadapi beberapa isu strategis yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan dan pencapaian kinerja. Isu-isu ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan manajerial, antara lain:

1. Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi
 - PPS Bitung menjadi salah satu pelabuhan prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP Pasca Produksi.
 - Tantangan muncul dalam bentuk penyesuaian sistem pelaporan, pencatatan hasil tangkapan, pengawasan kegiatan kapal, dan integrasi data, yang membutuhkan SDM terlatih serta infrastruktur pendukung yang memadai.
 - Sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap perubahan mekanisme pungutan dan sistem kuota juga masih menjadi kendala di lapangan.



2. Ketimpangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan

- Beberapa infrastruktur utama seperti dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI), jalan pelabuhan dan fasilitas logistik memerlukan rehabilitasi atau pengembangan lebih lanjut.
- Keterbatasan sarana ini berdampak pada kelancaran pelayanan kapal, efisiensi logistik, dan mutu penanganan hasil tangkapan, yang secara langsung memengaruhi volume produksi dan nilai tambah sektor perikanan.

3. Kualitas dan Ketersediaan Data Produksi Perikanan

- Validitas dan kecepatan pelaporan data produksi hasil tangkapan menjadi isu penting dalam pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).
- Diperlukan penguatan sistem digitalisasi, pemantauan *real-time*, dan koordinasi lintas instansi untuk meningkatkan akurasi dan integritas data produksi.

4. Koordinasi Lintas Sektor dan Lembaga

- PPS Bitung berada di lingkungan kerja yang melibatkan berbagai instansi seperti UPT KKP lainnya, Pemerintah Daerah, TNI AL, Syahbandar, Karantina, dan Kepolisian Perairan.
- Koordinasi antar lembaga dalam hal perizinan, pengawasan, distribusi ikan, dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi prosedur dan kewenangan.

5. Dampak Perubahan Iklim terhadap Operasional Pelabuhan

- Perubahan iklim mempengaruhi pola migrasi ikan, kondisi cuaca ekstrem, dan frekuensi kerusakan sarana pelabuhan.
- Hal ini berpengaruh pada produktivitas armada, kestabilan pasokan ikan, dan perencanaan kegiatan pelabuhan, sehingga diperlukan strategi adaptasi berbasis lingkungan.

6. Kapasitas SDM dan Dukungan Teknologi Informasi

- Masih terdapat kesenjangan kapasitas SDM dalam penguasaan sistem informasi, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik digital.

- Pengembangan kompetensi SDM serta modernisasi sistem informasi menjadi prioritas dalam mendukung manajemen pelabuhan yang lebih efisien dan transparan.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada dasarnya laporan kinerja disusun dengan menyajikan informasi tentang :

1. Uraian singkat organisasi
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan
3. Pengukuran Kinerja
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja PPS Bitung Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja PPS Bitung Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) PPS Bitung Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

- 1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
- 2) **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

3) Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja (PK) tahun yang bersangkutan.

4) Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi pada Tahun 2025 dan realisasi anggaran.

Capaian kinerja organisasi berisi :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir (jika ada)
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian (jika ada)
- e. Analisa penyebab keberhasilan maupun kegagalan serta peningkatan maupun penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan ;
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dan;
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi anggaran berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

5) Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6) Lampiran. Isi dari pada lampiran berupa perjanjian kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai selama periode tahun 2025 oleh PPS Bitung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan perikanan kepada kapal perikanan, nelayan dan pelaku usaha perikanan secara efektif, efisien dan profesional;
2. Mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang perikanan tangkap, khususnya Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penerapan PNBK Pasca Produksi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan dalam mendukung kegiatan operasional perikanan dan distribusi hasil tangkapan;
4. Mewujudkan sistem pendataan dan pelaporan produksi perikanan yang akurat, cepat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi kinerja;

- 
5. Memperkuat koordinasi kelembagaan dan sinergi antarinstansi dalam rangka pengawasan, pelayanan dan penegakan hukum di lingkungan pelabuhan;
 6. Mendorong pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam Asta Cita Presiden dan Rencana Strategis KKP.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

Pada Tahun 2025, terdapat 5 (Lima) sasaran dan 18 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”.
2. Sasaran kegiatan “ Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat” dengan indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”.
3. Sasaran Kegiatan “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal dan Bertanggung Jawab” dengan indikator kinerja diantaranya:
 - a. Persentase Permohonan perusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - c. Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;

- 
- e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
 - 4. Sasaran Kegiatan “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja antara lain :
 - a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi Ketentuan;
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.
 - 5. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja antara lain:
 - a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera;
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - f. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
 - i. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Target kinerja PPS Bitung tahun 2025 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target PPS Bitung Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	2.391,629
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)	51.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	86
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	97
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	60
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	50
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	950
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
Program Dukungan Manajemen				
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	88,5



Dalam mencapai sasaran strategis, pada tahun 2025 PPS Bitung melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud dari pelaksanaan 2 program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp69.764.210.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Rp56.581.943.000,-)
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Rp9.696.000,-)
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Rp13.182.267.000,-)

Pada tahun 2025 PPS Bitung mendapatkan alokasi blokir efisiensi anggaran sebesar Rp883.865.000,- sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan/direalisasikan sebesar Rp68.880.345.000,-.

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor berkala terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk tahun berikutnya. Rencana aksi sebagai bentuk penjabaran sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rencana Aksi Atas Penetapan Kinerja PPS Bitung Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ALOKASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA												
			PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan																					
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA TKPU	Pelaksanaan tata kelola dan pembinaan pelayanan pengusaha (pengadaan karcis gol I, dan kertas thermal)	14.000.000	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
					Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan TPI Higienis	11.039.000	2	kegiatan	-	-	-	-	-	1							1
					Pemeliharaan Portal otomatis	5.000.000	4	kegiatan			1			1		1				1	
2	Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkatkan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN	Pengelahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	-	12	kegiatan													
					Operasional Lembaga WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	8.806.000	1	Kegiatan													
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA TKPU	Penandatanganan Perjanjian Kontrak dengan pengguna jasa, kios pesisir dan monitoring penggunaan tanah dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan	8.000.000	2	kegiatan	1										1		
				TIMJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	-	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung		Pelaksanaan tata kelola dan operasional CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	16.800.000	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				TIMJA KESYAHBANDARAN	Pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	205.909.000	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung		Pelaksanaan tata kelola dan operasional SHTI di pelabuhan perikanan	-	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ALOKASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA											
				PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
					Pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan	890.000	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA SARPRAS	Pengadaan dan rehabilitasi prasarana perkantoran	-	1	kegiatan						-			1			
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA SARPRAS	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di pelabuhan perikanan	70.296.000	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	TIMJA KESYAHBANDARAN	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran kelaikan kapal perikanan	-	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	TIMJA KESYAHBANDARAN	Pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	205.909.000	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Program Dukungan Manajemen																				
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan PPS Bitung	-	1	Kegiatan												1
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan	-	4	kegiatan	1			1			1			1		
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan PPS Bitung	-	1	Kegiatan												1
		13	Indeks Profesionalitas ASN	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	Layanan Manajemen SDM	-	2	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ALOKASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA											
			PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
				di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung		Gaji dna tunjangan kinerja	6.076.822.000	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	1	unit											1
					Pengadaan sarana perkantoran	-	1	unit											1
					Pengadaan prasarana perkantoran	-	1	unit											1
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	Operasional dan pemeliharaan perkantoran	4.629.664.000	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	Layanan manajemen keuangan	24.020.000	12	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan	-	4	kegiatan	1			1		1			1		
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	16.435.000	2	kegiatan						1			1		
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	TIMJA DUKUNGAN MANAJERIAL	Pelaksanaan tata kelola dan pembinaan pelayanan perusahaan (Survey kepuasan Masyarakat)	55.200.000	4	kegiatan			1			1		1			1



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja PPS Bitung tahun 2025 dilakukan terhadap 18 indikator kinerja (9 Indikator Kinerja Utama/IKU dan 9 Indikator Kinerja Manajerial/IKM) dan telah dilakukan penginputan hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku. Hasil pengukuran kinerja PPS Bitung tahun 2025 pada aplikasi kinerja mendapatkan skor sebesar 115,23. Hasil pengukuran ini merupakan Nilai Kinerja Organisasi/NKO PPS Bitung dengan mendapatkan predikat istimewa (berwarna biru).

Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPS Bitung Tahun 2025



Capaian indikator kinerja PPS Bitung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja PPS Bitung Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Capaian 2025	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	2.391,629	4.850,97	120,00
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat	02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (ton)	51.000	88.655,50	120,00
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal dan Bertanggung Jawab	03	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	100	100	100,00
		04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	86	97,17	112,99
		05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	97	100	103,09
		06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	60	72	120,00
		07	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	50,00	87,92	120,00
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	08	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	950	1.024	107,79
		09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	0,26	0,58	120,00
5	Terwujudnya Layanan Dukungan manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	75,5	94,19	120,00
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	85	100	117,65
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	88	88,50	100,57
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	87	89,09	102,40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Capaian 2025	%
		14	Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	76	100	120,00
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	81	87,50	108,02
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	92	85,10	92,50
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	71,5	90,50	120,00
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	88,50	93,04	105,13

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 18 indikator kinerja PPS Bitung tahun 2025, terdapat 8 indikator kinerja yang pengukurannya dilakukan pada triwulan III dan telah tercapai di atas target. Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target capaian tahun 2025;
2. Membandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2024;
3. Membandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target tahun jangka menengah dalam dokumen renstra;
4. Membandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan standar nasional/ unit kerja lain yang setara di Kementerian (PPS Kendari);

- 
5. Menyajikan analisa (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target tahun 2025 berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator dan alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target tahun 2025.
 7. Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mencapai target tahun 2025.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

IKU 1. PENERIMAAN PNBP NON SDA DI PPS BITUNG

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi). Penghitungan dari IKU ini sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator nilai Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari penerimaan fungsional dan juga penerimaan umum. Penerimaan fungsional terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan jasa pelabuhan perikanan (pelayanan tambat labuh, pelayanan kebersihan, pelayanan pas masuk, pelayanan pengadaan air dan pemakaian listrik dengan sumber dari pelabuhan) dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai

dengan tugas dan fungsi pelabuhan (tanah di kawasan pelabuhan, tanah yang dipakai di kawasan pelabuhan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin serta pelayanan penggunaan transportasi).

Pada tahun 2025, target penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bitung sebesar Rp2.391.629.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp4.850.973.672,- (202,83%). Hal ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan melebihi ekspektasi. Penerimaan PNBP Non SDA tiap bulan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

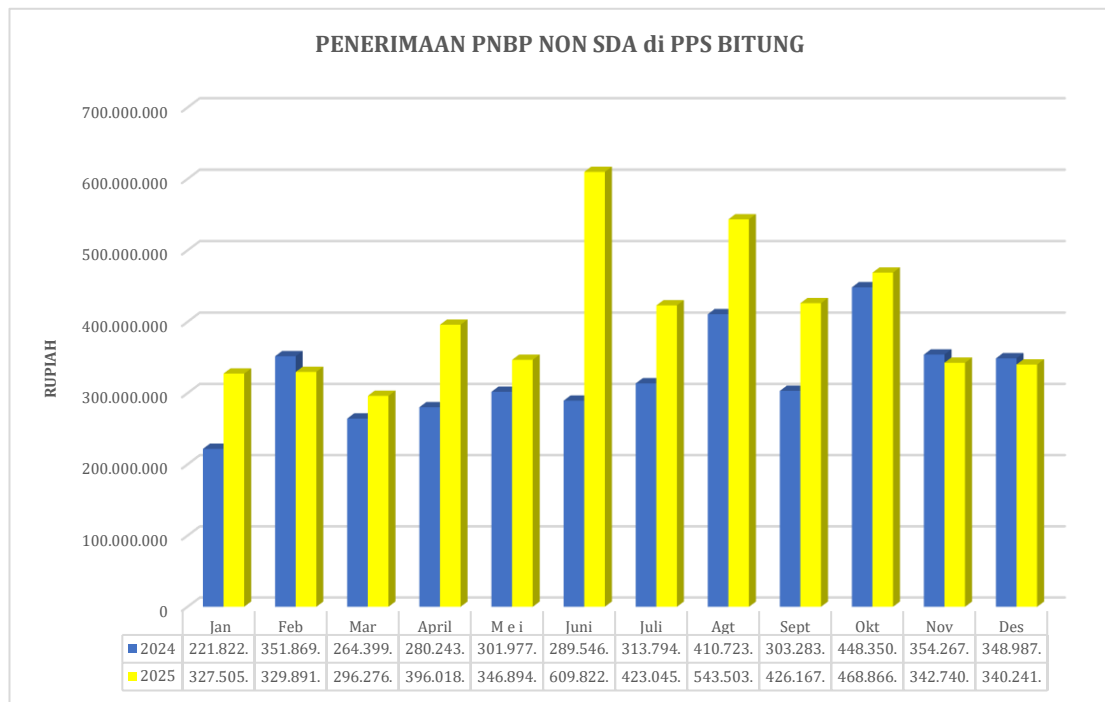
Tabel 6. Capaian Penerimaan PNBP Non SDA Tahun 2025

No.	Jenis PNBP	Akun	REALISASI												TOTAL REALISASI
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
TOTAL			327.505.508	329.891.628	296.276.468	396.018.205	346.894.120	609.822.572	423.045.612	543.503.716	426.167.099	468.866.706	342.740.275	340.241.763	4.850.973.672
Penerimaan Fungsional			326.016.959	329.033.079	295.551.810	355.533.455	346.169.462	368.169.726	358.113.924	334.320.028	358.519.539	360.986.146	341.698.715	338.219.020	4.112.331.863
A	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	425621	311.448.921	293.247.894	288.340.810	322.816.335	336.149.462	335.210.756	338.869.183	297.410.039	318.849.712	330.636.202	316.926.100	310.037.116	3.799.942.530
1	Pelayanan Tambat Labuh	425621	63.777.505	41.703.690	52.733.765	64.117.756	69.340.635	64.391.270	79.127.685	72.569.770	65.152.541	77.633.705	77.590.338	55.520.898	783.659.558
2	Pelayanan Kebersihan	425621	9.813.340	24.388.080	7.106.100	13.552.200	9.678.100	20.226.585	13.767.294	14.348.745	19.067.738	17.168.622	18.094.659	11.956.728	179.168.191
3	Pelayanan Pas Masuk	425621	234.008.000	223.175.000	225.438.000	241.397.000	251.651.000	248.178.000	240.940.000	205.176.000	226.595.000	228.562.000	215.324.000	231.647.000	2.772.091.000
4	Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Sumur Sendiri (Sumur Bor) yang Dialirkan Melalui Pipa di Dermaga/ Tempat Pelaelangan Ikan dan Tempat Lainnya	425621	3.760.000	3.920.000	2.960.000	3.640.000	5.380.000	2.320.000	4.920.000	3.140.000	4.400.000	3.740.000	3.760.000	6.460.000	48.400.000
5	Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Sumur Sendiri (Sumur Bor) yang Dialirkan Melalui Alat Transportasi Lainnya	425621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6	Pemakaian Listrik yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan	425621	90.076	61.124	102.945	109.379	99.727	94.901	114.204	2.175.524	3.634.433	3.231.875	2.157.103	4.452.490	16.323.781
B	Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tasi	425151	14.568.038	35.785.185	7.211.000	32.717.120	10.020.000	32.958.970	19.244.741	36.909.989	39.669.827	30.349.944	24.772.615	28.181.904	312.389.333
1	Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan	425151	1.009.038	26.509.185	-	18.832.200	-	4.272.368	5.844.825	19.578.423	17.086.692	13.852.506	10.629.400	12.358.999	129.973.636
2	Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk	425151	8.215.000	3.524.000	1.175.000	6.971.920	3.005.000	21.811.602	6.424.916	11.076.566	15.299.135	9.082.438	8.107.215	9.498.905	104.191.697
3	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	425151	3.660.000	4.365.000	4.650.000	4.630.000	5.330.000	5.090.000	5.390.000	4.770.000	5.500.000	5.630.000	4.650.000	4.740.000	58.405.000
4	Pelayanan Penggunaan Transportasi	425151	1.684.000	1.387.000	1.386.000	2.283.000	1.685.000	1.785.000	1.585.000	1.485.000	1.784.000	1.785.000	1.386.000	1.584.000	19.819.000
Penerimaan Umum			1.488.549	858.549	724.658	40.484.750	724.658	241.652.846	64.931.688	209.183.688	67.647.560	107.880.560	1.041.560	2.022.743	738.641.809
A	Sewa Rumah Negara Tapak	425151	858.549	858.549	724.658	724.658	724.658	762.846	1.006.688	1.006.688	1.041.560	1.041.560	1.041.560	673.743	10.465.717
B	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	425131	0	0	0	0	0	240.890.000	63.925.000	208.177.000	66.606.000	106.839.000	0	0	686.437.000
C	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	425792	0	0	0	39.760.092	0	0	0	0	0	0	0	0	39.760.092
D	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000
E	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Sanksi dan Denda Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	425811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.000	1.349.000

Dalam waktu satu tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, penerimaan PNBP Non SDA terbesar tercapai pada bulan Juni 2025 sebesar Rp609.822.572,- disusul dengan bulan Agustus sebesar Rp543.503.716,- dan bulan Oktober sebesar Rp468.866.706,-. Pendapatan PNBP Non SDA paling banyak berasal dari sektor pelayanan pas masuk kendaraan baik roda 2,3,4,6,10 maupun lebih dari 10 (berkisar antara 57% dari total penerimaan PNBP Non SDA tahun 2025), disusul dari jasa pelayanan tambat labuh (sekitar 16% dari total penerimaan PNBP Non SDA), dari jasa pendapatan sewa tanah dan bangunan (sekitar 14% dari total penerimaan PNBP Non SDA) dan sisanya berasal dari penerimaan jasa-jasa pelabuhan lainnya (sekitar 13% dari total penerimaan PNBP Non SDA).

Jika dibandingkan antara capaian tahun 2024 dengan tahun 2025, pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian yang lebih besar daripada tahun 2024 (realisasi

tiap bulan cenderung lebih tinggi pada tahun 2025). Peningkatan penerimaan PNBP Non SDA sebesar Rp961.707.638,- (24,73%) dari capaian tahun 2024 dengan capaian tahun 2025.



Grafik 1. Perbandingan Penerimaan PNBP Non SDA pada tahun 2024 dan 2025

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian /realisasi antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Pemilihan PPS Kendari dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa PPS Bitung dan PPS Kendari merupakan pelabuhan perikanan dengan kategori kelas pelabuhan yang sama yaitu pelabuhan perikanan kelas A. Selain itu juga letak wilayah yang sama-sama di Pulau Sulawesi menjadi salah satu faktor pemilihannya. PPS Kendari dengan target Penerimaan PNBP Non SDA sebesar Rp7.241,04 juta dan telah terealisasi sebesar Rp7.388,66 atau sebesar 102,03%. Jika dibandingkan dengan PPS Kendari, target dan realisasi PPS Bitung masih jauh dibawah PPS Kendari. Namun demikian apabila dibandingkan secara persentase, maka PPS Bitung memiliki persentase capaian yang lebih besar dari PPS Kendari yaitu mencapai 202,03%. Selisih persentase sebesar 100%. Meskipun sama-sama merupakan pelabuhan perikanan kelas A, namun luas area pelabuhan di PPS Kendari lebih besar daripada PPS Bitung. Sehingga target dan capaiannya lebih besar daripada PPS Bitung.



Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan PNBP Non SDA pada tahun 2025 adalah dilakukannya monitoring dan evaluasi penerimaan PNBP Non SDA terutama pada pelayanan pas masuk harian. Pengaturan jadwal petugas pas masuk yang lebih adil dan merata. Dilakukan pembekalan kepada petugas penarikan jasa pas masuk untuk bertindak lebih tegas kepada pengguna jasa yang akan masuk ke kawasan pelabuhan untuk tertib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku. Selain itu perlengkapan fasilitas dalam pas masuk juga diperhatikan seperti pemeliharaan ac/pendingin di dalam ruangan sehingga membuat nyaman petugas penarikan pas masuk.

Namun demikian pada tahun 2025 ini terdapat efisiensi anggaran sehingga pemeliharaan portal pas masuk dilakukan secara selektif. Beberapa kali terjadi penurunan fungsi portal pas masuk seperti palang pintu yang lambat dalam merespon sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Perbaikan dilakukan oleh teknisi dengan melakukan peremajaan terhadap beberapa alat di portal untuk memperlancar proses membuka dan menutup palang pintu pas masuk.

Meskipun dengan kondisi efisiensi anggaran, namun kegiatan tetap dilakukan, beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target penerimaan PNBP Non SDA tahun 2025 adalah adanya kegiatan evaluasi capaian penerimaan PNBP Non SDA yang dilakukan oleh Timja Pelayanan Usaha setiap bulan, pelaksanaan pembinaan pelayanan perusahaan oleh Katimja Pelayanan Usaha kepada pegawai/petugas pelayanan usaha, kerjasama yang dilakukan antar tim kerja di PPS Bitung untuk menciptakan pelayanan prima kepada pengguna jasa PPS Bitung, kegiatan penandatanganan perjanjian kontrak dengan pengguna jasa kios pesisir, serta dilakukan monitoring penggunaan tanah,

Realisasi anggaran mendukung pencapaian IKU ini di tahun 2025 adalah sebesar Rp231.678.725,- (91,83%) dari alokasi anggaran sebesar Rp252.272.000,-. Meskipun demikian dengan anggaran yang terbatas/dilakukan efisiensi anggaran, target IKU Penerimaan PNBP Non SDA tetap tercapai, bahkan melebihi target yang telah ditentukan pada saat proses perencanaan/penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dengan terdapat kelebihan target pagu PNBP Non SDA, dapat digunakan kembali kelebihan tersebut untuk kegiatan yang mendukung meningkatkan penerimaan PNBP dan peningkatan kualitas

pelayanan yang ada di PPS Bitung. Diantaranya Adalah pengadaan beberapa peralatan untuk petugas pelayanan seperti kemeja, jas hujan, sepatu, topi lapangan serta adanya pengadaan sarana prasarana seperti pengadaan meja kasir pos masuk, sepeda motor untuk pelayanan, laptop, dan printer.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi (115,97%/99,82%) didapatkan nilai sebesar 2,2 sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IK Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bitung.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target penerimaan PNBP Non SDA tahun 2025 adalah adanya pemeliharaan/maintenance /pengecekan portal otomatis setiap bulan, monitoring dan evaluasi capaian penerimaan PNBP Non SDA yang dilakukan oleh Timja Pelayanan Usaha setiap bulan, pembinaan pelayanan perusahaan oleh Katimja Pelayanan Usaha kepada pegawai/petugas pelayanan usaha serta kerjasama yang dilakukan antar tim kerja di PPS Bitung untuk menciptakan pelayanan prima kepada pengguna jasa PPS Bitung. Beberapa dokumentasi kegiatan mendukung pencapaian Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bitung terlihat dibawah ini.



Gambar 4. Pembinaan pelayanan perusahaan kepada petugas pelayanan



Gambar 5. Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan tanah dan bangunan/kios dan monitoring penumpukan barang di PPS Bitung



Gambar 6. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Tanah dan Bangunan/Kios Pesisir

IK 2. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Indikator ini menghitung jumlah volume produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) yang di daratkan oleh kapal penangkap ikan dan kapal penyangga di wilayah kerja operasional PPS Bitung. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas pendataan ikan (enumerator) dengan pencacahan lengkap menggunakan form monitoring data produksi harian. Realisasi data produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan dan dilakukan validasi setiap bulannya.

Capaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 88.983,92 ton. Jika capaian ini dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 51.000 ton, maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 174,48%.

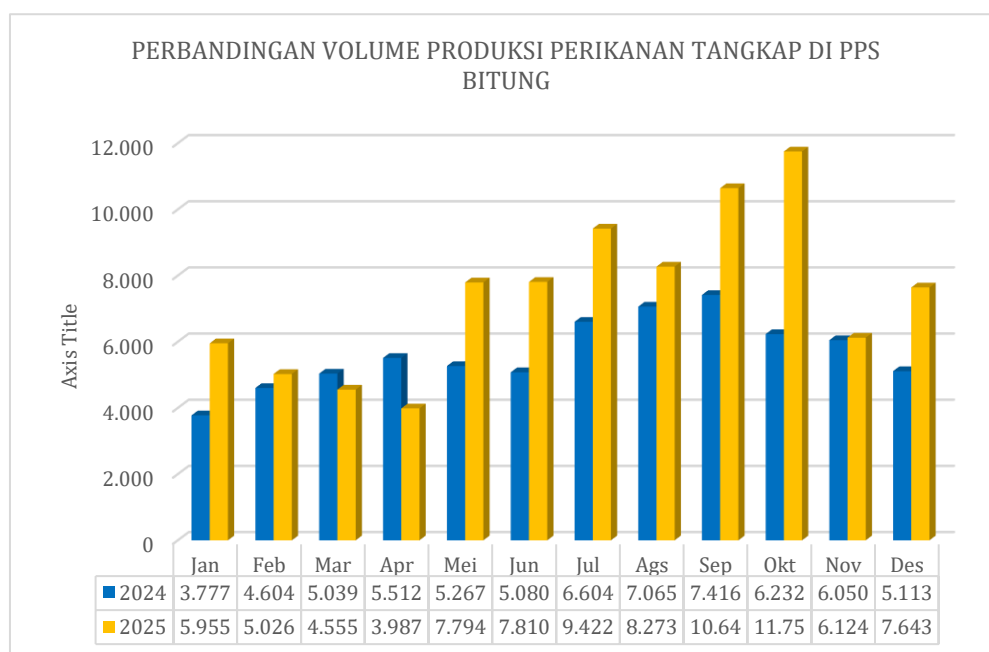
Tabel 7. Capaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung Tahun 2025

NO	BULAN	2025	
		PRODUKSI (Kg)	NILAI (Rp)
1	Januari	5.954.682	125.034.695.088
2	Februari	5.026.227	115.094.144.075
3	Maret	4.554.727	110.559.528.641
4	April	3.986.852	106.283.140.622
5	Mei	7.793.739	191.542.286.422
6	Juni	7.810.357	188.554.721.952
7	Juli	9.421.667	221.135.193.690
8	Agustus	8.272.829	194.553.743.356
9	September	10.643.713	233.210.618.729
10	Oktober	11.752.162	248.809.997.984
11	November	6.124.222	143.656.712.404
12	Desember	7.642.739	188.089.142.410
JUMLAH		88.983.916	2.066.523.925.373

Berdasarkan tabel capaian volume produksi perikanan tangkap tahun 2025 diatas, terlihat penurunan volume produksi dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2025. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah terjadinya kondisi cuaca ekstrim di awal tahun seperti ombak tinggi, dan hujan lebat yang

melanda Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menyebabkan banyak nelayan yang menunda untuk melakukan penangkapan ikan sambil menunggu cuaca berangsur-angsur kembali normal. Di bulan Mei sampai dengan Oktober 2025 produksi perikanan mengalami kenaikan yang signifikan, hampir mencapai 2-4x dari hasil produksi di bulan April. Hal ini disebabkan kondisi cuaca yang sudah normal dan sudah kondusif untuk dilakukan penangkapan ikan. Selain itu juga banyak kapal-kapal yang melakukan pembongkaran ikan di PPS Bitung dan di beberapa pelabuhan binaan lainnya. Terutama pada bulan Oktober, banyak kapal frozen dengan ukuran yang besar melakukan pendaratan dan pembongkaran ikan di PPS Bitung. Dalam 1 hari bisa dilakukan pembongkaran pada 20-30 kapal perikanan. Namun demikian pada bulan November dan Desember terjadi penurunan volume produksi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya cuaca ekstrim di akhir tahun seperti ombak tinggi, dan hujan lebat yang melanda Provinsi Sulawesi Utara setiap harinya.

Capaian volume produksi perikanan tangkap di PPS Bitung pada tahun 2024 sebesar 67.760,423 ton. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, maka pada tahun 2025 telah terjadi peningkatan volume produksi perikanan tangkap sebesar 21.223,493 ton (31,32%). Perbandingan volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Grafik 2. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap tahun 2024 & 2025



Pada bulan Januari 2025 mencatat kenaikan produksi terbesar yaitu 2.156 ton atau 57,08% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Januari 2024. Pada bulan Februari 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,42% jika dibandingkan dengan bulan Februari 2024. Pada bulan Maret 2025 mengalami penurunan produksi sebesar 9,65% dibandingkan bulan Maret 2024. Begitu pula di bulan April mengalami penurunan yang paling besar yaitu sebesar 28,07%. Namun demikian pada bulan Mei sampai dengan Desember 2025 mengalami kenaikan. Pada bulan Juli, September dan Oktober memiliki jumlah volume produksi terbesar jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Juli sampai dengan Oktober cuaca mulai membaik dimana kondisi angin dan arus laut cenderung stabil serta membawa massa air dingin yang kaya nutrien (upwelling). Kondisi ini meningkatkan kesuburan perairan dan ketersediaan plankton, sehingga populasi ikan meningkat dan tangkapan nelayan menjadi lebih banyak. Pada periode ini, curah hujan rendah dan gelombang laut cenderung lebih tenang, memungkinkan nelayan lebih sering melaut dengan durasi operasi penangkapan yang lebih lama. Aktivitas penangkapan tidak banyak terganggu oleh badai atau cuaca ekstrem. Musim puncak ikan mendorong nelayan untuk lebih aktif melaut. Frekuensi trip penangkapan meningkat karena potensi hasil tangkapan lebih besar. Selain itu banyak kapal frozen yang melakukan pembongkaran ikan di PPS Bitung sehingga meningkatkan aktivitas pembongkaran ikan dan meningkatnya volume produksi yang ada di PPS Bitung. .

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target volume produksi perikanan tangkap PPS Kendari tahun 2025 sebesar 16.000 ton dan telah tercapai sebesar 16.935,92 ton (105,85%). Secara target dan realisasi/capaian kinerja, PPS Bitung memiliki angka target dan realisasi yang lebih tinggi dari PPS Kendari. Selisih dari target dan realisasi hampir mencapai 5x lipat. Sehingga dapat disimpulkan meski PPS Bitung memiliki jumlah area pelabuhan yang lebih kecil, namun demikian frekuensi kedatangan kapal dan kegiatan pembongkaran hasil tangkapan ikan lebih besar dan lebih ramai di PPS Bitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lokasi dari PPS Bitung yang strategis.



Peningkatan volume produksi perikanan tangkap tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah semakin baiknya proses pencatatan data produksi perikanan sehingga menghasilkan data yang akurat di PPS Bitung. Selain itu juga adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antar kelompok kerja operasional, kesyahbandaran dan juga peran aktif dari para petugas pendataan ikan. Pendataan ikan pada kapal yang melakukan pembongkaran di PPS Bitung maupun di pelabuhan binaan yang dilakukan oleh enumerator yang ada. Selain itu juga banyaknya kapal frozen yang melakukan pembongkaran hasil tangkapan di PPS Bitung sehingga meningkatkan jumlah volume produksi perikanan tangkap. Namun demikian penurunan volume produksi perikanan tangkap di bulan maret dan april, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor cuaca dan kondisi alam (terjadinya musim barat, yang merupakan musim yang beresiko tinggi bagi aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Sulawesi Utara, termasuk Laut Maluku, Laut Sulawesi dan sekitarnya). Gelombang laut tinggi, angin kencang dan surut hujan yang tinggi menyebabkan penurunan hari melaut, peningkatan resiko keselamatan pelayaran sehingga banyak kapal yang memilih tidak beroperasi serta penurunan tangkapan karena ikan cenderung menyebar atau berpindah ke perairan yang lebih dalam dan sulit dijangkau. Pada awal tahun 2025, BMKG mengeluarkan beberapa peringatan dini cuaca ekstrem terutama pada bulan Januari hingga april 2025 yang disebabkan adanya siklon.

Terdapat realisasi anggaran untuk mendukung IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung sebesar 100%. Realisasi anggaran digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka WPPNRI. Meskipun demikian dengan anggaran yang terbatas/dilakukan efisiensi anggaran, target IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bitung tetap tercapai, bahkan melebihi target yang telah ditentukan pada saat proses perencanaan/penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,45. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih

dari 1 sehingga dalam pencapaian volume produksi perikanan tangkap telah terjadi efisiensi sumber daya.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian volume produksi perikanan tangkap periode tahun 2025 adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pendataan volume produksi perikanan oleh katimja operasional pelabuhan perikanan, serta dilakukannya validasi data statistik yang dilakukan rutin setiap bulan oleh timja operasional pelabuhan perikanan. Pelayanan untuk pembongkaran ikan di PPS Bitung dilakukan 24 jam dengan sistem pergantian shift. Selain itu juga validasi dari bagian operasional pelabuhan dilakukan secepat dan seakurat mungkin. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas enumerator, petugas validasi pendataan ikan serta hasil volume produksi setiap harinya.

IK 3. PERSENTASE PERMOHONAN PENGUSAHAAN YANG DIANALISA DAN/ATAU DIEVALUASI DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBPN yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan. Penghitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah usulan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dengan jumlah total usulan pengusahaan yang masuk di PPS Bitung tahun 2024 ini. Selain itu juga dilakukan standarisasi pelayanan pengusahaan berupa pembuatan SOP, pelaksanaan ISO 9001/2015 serta standar pelaksanaan lainnya.

Pada tahun 2025 ini PPS Bitung memiliki target persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi sebesar 100%. IKU ini menjadi tanggungjawab dari tim kerja tata kelola pelayanan usaha.



Capaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target yang telah ditentukan di awal tahun adalah 100 persen. Persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% (berkategori baik karena capaian antara 90-110%). Pada tahun 2025, seluruh usulan perusahaan baik usulan baru maupun usulan perpanjangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAN (Sistem Aplikasi Manajemen Aset negara), sehingga usulan tahun 2024 yang belum selesai/keluar persetujuannya, akan diusulkan kembali melalui aplikasi SIMAN. Terdapat beberapa usulan dari tahun 2024 yang belum selesai sehingga dilanjutkan di tahun 2025. Usulan ini belum mendapat persetujuan dari KPKNL Manado dikarenakan terdapat beberapa kriteria yang perlu diperbaiki yaitu tentang pengukuran luas tanah. Terdapat 21 permohonan sewa tanah dan/atau gedung bangunan yang ada di PPS Bitung, dimana 4 permohonan berasal dari Koperasi sedangkan 17 lainnya berasal dari PT, CV, KSU maupun UD.

Capaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 100%. Namun demikian jika dilihat dari jumlah usulan permohonan yang masuk, pada tahun 2024 memiliki jumlah usulan permohonan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2025. Pada tahun 2025 terdapat 21 usulan permohonan yang masuk dan dianalisa dan dievaluasi sedangkan tahun 2024 sebanyak 37 usulan permohonan. Selain itu pada tahun 2025 juga dilakukan Konsultasi Publik berupa review SOP pelayanan dengan pengguna jasa, dan pelaksanaan surveillance ISO 9001/2015 pada bulan November 2025.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi PPS Kendari tahun 2025 sebesar 100 persen dan telah tercapai sebesar 100 persen (100%). Secara target dan realisasi/capaian kinerja, PPS Bitung memiliki angka target dan realisasi yang sama dengan PPS Kendari. Seluruh usulan permohonan yang masuk telah dianalisa dan/atau dievaluasi oleh masing-masing Pelabuhan Perikanan.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini salah satunya dari kelengkapan berkas permohonan usulan perpanjangan maupun baru telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Selain itu juga berkat ketelitian dan kecermatan dari petugas pengevaluasi usulan perusahaan yang masuk. Pada tahun 2025, proses usulan permohonan perusahaan baik baru maupun perpanjangan sudah dilakukan secara online dan juga melibatkan dari bagian pengelola BMN sehingga lebih terorganisir dan terdokumentasi dengan baik.

Dari anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi sebesar Rp13.250.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp13.250.000,- (100%). Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai 1 sehingga dalam pencapaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi telah terjadi efisiensi sumber daya.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi periode tahun 2025 adalah kegiatan penandatanganan perjanjian kontrak dengan pengguna jasa kios pesisir dan monitoring penggunaan tanah, konsultasi publik berupa review SOP pelayanan kepada seluruh pengguna jasa di PPS Bitung.



Gambar 7. Monitoring Penggunaan Tanah di PPS Bitung



Gambar 8. Monitoring Pelayanan TPI Higienis dan Kegiatan Forum Konsultasi Publik di PPS Bitung

IK 4. TINGKAT KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

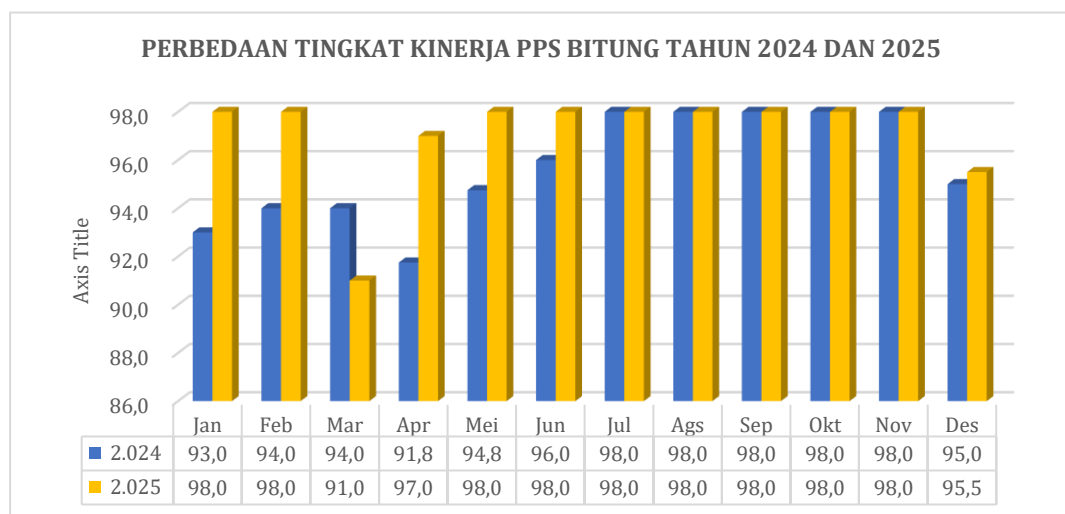
Capaian indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 97,17. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 86 maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 112,99% (berkategori istimewa karena capaian diatas 110%).

Capaian tingkat kinerja PPS Bitung pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	REALISASI OKTOBER	NILAI OKTOBER	REALISASI NOVEMBER	NILAI NOVEMBER	REALISASI DESEMBER	NILAI DESEMBER
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	31	5	30	5	31	5
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	Ya	2	Ya	2
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	Ya	2	Ya	2
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	Ya	2	Ya	2
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	145,64	4	150,21	4	102,45	4
6	Pendapatan Pelabuhan	%	166,63	4	166,63	4	112,22	4
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	Lengkap	4	Lengkap	4
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	29.317,00	4	21.315,00	4	27.901,00	4
9	Panjang Dermaga	m	1.414,00	4	1.414,00	4	1.414,00	4
10	Kedalaman Kolam	cm	500	4	500	4	500	4
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	Ada	2	Ada	2
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	Lengkap	2	Lengkap	2
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	8,78	2	8,78	2	8,78	2
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	2.056,00	5	1.372,00	5	1.616,00	5
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	320,66	5	234,4	5	235,03	5
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	526	5	376	5	540	5
17	STBLKK	%	100,87	5	107,72	5	71,96	2,5
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	9	4	12	4	15	4
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantina Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	13	4	8	4	10	4
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	Baik	4	Baik	4
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	100	4	100	4
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	100	4	100	4
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	100	5	100	5
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	12	2	12	2	12	2
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	99,41	3	99,41	3	99,41	3
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	11.412,28	3	11.439,64	3	11.691,99	3
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	9 (32)	4	7 (32)	4	7 (32)	4
Jumlah				98		98		95,5
Kesimpulan dan Rekomendasi (PERBULAN)				SANGAT BAIK		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK

Tabel 8. Capaian IK Tingkat Kinerja PPS Bitung Tahun 2025

Dalam tiga bulan pada tahun 2025, tingkat kinerja PPS Bitung memiliki nilai yang sama yaitu 98,00 kecuali di bulan Desember yang memiliki nilai 95,5. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, maka pada tahun 2025 telah terjadi peningkatan tingkat kinerja PPS Bitung sebesar 0,17 atau sebesar 0,17%. Perbandingan tingkat kinerja PPS Bitung pada tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3. Perbandingan Tingkat Kinerja PPS Bitung tahun 2025 dan 2024



Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target tingkat kinerja PPS Kendari tahun 2025 sebesar 87 dan telah tercapai sebesar 99,17 (113,98%). PPS Bitung dan PPS Kendari memiliki target indikator yang sama, tetapi untuk realisasi PPS Bitung memiliki capaian yang lebih rendah dari PPS Kendari.

Peningkatan tingkat kinerja PPS Bitung tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kontribusi dan komitmen dari petugas penginput pelaksanaan kegiatan pada aplikasi PIPP secara tertib dan teratur, adanya monitoring, evaluasi, supervisi dan validasi secara berkala terhadap data yang telah dilakukan penginputan; serta adanya tindak lanjut monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan penginputan data pada aplikasi PIPP.

Kegiatan penginputan data dalam aplikasi PIPP memerlukan ketelitian dan kecermatan. Sebagai upaya untuk menghindari adanya *human eror* dalam penginputan data PIPP perlu adanya verifikasi data PIPP setiap bulan oleh timja operasional pelabuhan perikanan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pegawai yang telah ditunjuk yang akan mengingatkan dan mengawasi penginputan PIPP dan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kinerja pelabuhan di aplikasi PIPP sebagai upaya untuk perbaikan ke depannya.

Realisasi anggaran mendukung tingkat kinerja ini sebesar Rp35.495.000,- (99,96%) dari total anggaran Rp33.510.000,-. Meskipun demikian dengan anggaran yang terbatas karena adanya efisiensi anggaran, target IKU Tingkat Kinerja PPS Bitung tetap tercapai, bahkan melebihi target yang telah ditentukan pada saat proses perencanaan/penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,13. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih dari 1 sehingga dalam pencapaian tingkat kinerja PPS Bitung telah terjadi efisiensi sumber daya.



Kegiatan penginputan data dalam aplikasi PIPP memerlukan ketelitian dan kecermatan, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis kepada petugas penginput dalam masing-masing tim kerja. Selain itu upaya untuk menghindari adanya *human error* dalam penginputan data PIPP perlu adanya verifikasi data PIPP setiap bulannya. Disisi lain juga dilakukan monitoring dan evaluasi oleh supervisor yang telah ditunjuk yang akan mengingatkan dan mengawasi penginputan PIPP dan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kinerja pelabuhan di aplikasi PIPP sebagai upaya untuk perbaikan ke depannya.

IK 5. TINGKAT PELAYANAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Tingkat pelayanan kesyahbandaran PPS bitung merupakan indikator yang dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu : jumlah surat persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) serta jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Pada tahun 2025, target tingkat pelayanan kesyahbandaran PPS Bitung berada di angka 97%. IKU ini menjadi tanggungjawab dari tim kerja kesyahbandaran PPS Bitung.

Capaian indikator kinerja tingkat pelayanan kesyahbandaran PPS bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 100 persen. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 97 persen, maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 112,99% (berkategori istimewa karena capaian diatas 110%). Jumlah surat persetujuan berlayar (SPB) yang telah diterbitkan pada tahun 2025 sebesar 1049 kapal. Surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan pada tahun 2025 sejumlah 9187 dokumen. Sedangkan untuk serta jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan sebesar 4.726 dokumen. Kapal yang beraktivitas di PPS Bitung pada tahun 2025 sebanyak 1.049 kapal dan semua kapal tersebut telah memiliki SPB dan STBLK.



Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, maka pada tahun 2025 memiliki nilai capaian yang sama yaitu 100%. Perbedaan antara tahun 2025 dan 2024 terletak pada jumlah kapal yang beroperasi/beraktivitas di PPS Bitung. Pada tahun 2025 terdapat 1.049 kapal yang beraktivitas, sedangkan di tahun 2024 terdapat 1.083 kapal.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 85 dan telah tercapai sebesar 85,37 (100,44%). PPS Bitung dan PPS Kendari memiliki target dan capaian indikator yang berbeda. PPS Bitung memiliki target dan capaian indikator yang lebih besar daripada PPS Kendari. Capaian PPS Bitung lebih besar dikarenakan kapal-kapal yang beroperasi di PPS Bitung telah memiliki SPB dan STBLK (kapal-kapal perikanan memiliki tingkat ketertiban yang lebih baik).

Peningkatan tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPS Bitung tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah komitmen dari petugas syahbandar untuk memberikan pelayanan yang semakin baik dan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga semakin meningkatnya kesadaran para nelayan/pelaku usaha yang menjadi stakeholder untuk mengurus surat-surat izin kapal dengan melengkapi dokumen persyaratan secara tertib.

Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp227.469.172,- atau sebesar 98,50% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp230.929.000,-. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,04. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih dari 1 sehingga dalam pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPS Bitung telah terjadi efisiensi sumber daya.

Kegiatan mendukung tercapainya indikator kinerja tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPS Bitung adalah operasional kesyahbandaran baik di bitung

maupun di pelabuhan binaan, diseminasi regulasi kesyahbandaran dan aplikasi teman SPB, rakor evaluasi kesyahbandaran, penanganan kebakaran keselamatan dan keamanan kapal, operasional SHTI, sosialisasi dan diseminasi penerapan SHTI dan lemar awal serta sosialisasi TCG dan regulasi kesyahbandaran serta rapat koorsinasi dan evaluasi pelaksanaan PIT dan kesyahbandaran di PPS Bitung dan Pelabuhan Binaan. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPS Bitung adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran Mendukung PNPB Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur





Gambar 10. Sosialisasi Modeling Pembongkaran Ikan di PPS Bitung



Gambar 11. Gerai Perizinan Kapal Perikanan di PPS Bitung



Gambar 12. Rapat Koordinasi Kesyahbandaran di PPS Bitung

IK 6. PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Penanggungjawab IK ini adalah dari tim kerja tata kelola sarana dan prasarana dengan target pada tahun 2025 ini sebesar 60%. Capaian indikator kinerja persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPS Bitung tahun 2025 adalah 72% (120%) dan memiliki kategori istimewa karena capaian diatas 110%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 72%, maka pada tahun 2025 memiliki nilai capaian yang sama. Pada tahun 2025 ini terdapat rehabilitasi/perbaikan jalan pelabuhan, dermaga dan kantor utama. Selain itu juga terdapat rehabilitasi TPI, rehabilitasi gedung kantor utama serta pemeliharaan rumah negara serta pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target persentase pengendalian pengembangan fasilitas di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 80 dan telah tercapai sebesar 98 (122,5%).

Keberhasilan capaian indikator kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan anggaran rehabilitasi/pemeliharaan dan juga dukungan dari SDM sarana dan prasarana yang telah melakukan perbaikan beberapa fasilitas pelabuhan perikanan di PPS Bitung. Beberapa fasilitas yang dilakukan berupa pemeliharaan gedung dan bangunan (TPI, kantor utama, gerbang, pos jaga/pos satpam, pos pas masuk, rumah dinas, ruang WPP, Gedung ex-syahbandar), perbaikan jalan kantor, jalan pelabuhan dan jalan dermaga, pemeliharaan gerbang, gate diatas pas masuk, pemeliharaan IPAL, dll.



Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp379.149.000,- atau sebesar 96,28% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp393.804.000,-. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,25. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih dari 1 sehingga dalam pencapaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PPS Bitung telah terjadi efisiensi sumber daya.

Kegiatan mendukung tercapainya indikator kinerja persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PPS Bitung adalah pemeliharaan gedung dan bangunan (TPI, kantor utama, gerbang, pos jaga/pos satpam, pos pas masuk, rumah dinas, ruang WPP, Gedung ex-syahbandar), perbaikan jalan kantor, jalan pelabuhan dan jalan dermaga, pemeliharaan gerbang, gate diatas pas masuk, pemeliharaan IPAL, dll.

IK 7. NILAI PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Capaian indikator nilai pengendalian lingkungan di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 87,92. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 50, maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 175,84% (berkategori istimewa karena capaian diatas 110%). Capaian nilai pengendalian lingkungan di PPS Bitung pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	NAMA PELABUHAN	2025			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	PPN Sibolga	96,16	96,13	96,03	288,31	96,10	SANGAT BAIK
2	PPN Pemangkat	95,36	95,09	95,19	285,64	95,21	SANGAT BAIK
3	PPS Bungus	92,65	93,41	93,41	279,47	93,16	SANGAT BAIK
4	PPN Kejawanan	97,03	89,47	89,47	275,98	91,99	SANGAT BAIK
5	PPS Cilacap	89,01	93,47	93,23	275,71	91,90	SANGAT BAIK
6	PPN Pengambangan	93,98	90,89	90,52	275,39	91,80	SANGAT BAIK
7	PPN Palabuhanratu	92,71	88,45	90,89	272,05	90,68	SANGAT BAIK
8	PPN Ternate	91,64	90,11	90,11	271,85	90,62	SANGAT BAIK
9	PPN Prigi	84,80	90,81	90,31	265,92	88,64	SANGAT BAIK
10	PPS Bitung	93,30	85,38	85,09	263,77	87,92	SANGAT BAIK
11	PPP Teluk Batang	93,80	84,66	84,55	263,01	87,67	SANGAT BAIK
12	PPN Brondong	87,33	87,47	87,56	262,36	87,45	SANGAT BAIK
13	PPS Kendari	85,62	85,87	85,95	257,44	85,81	SANGAT BAIK
14	PPN Tanjung Pandan	85,74	83,49	82,98	252,21	84,07	SANGAT BAIK
15	PPN Ambon	90,52	80,52	80,52	251,56	83,85	SANGAT BAIK
16	PPS Nizam Zachman Jakarta	77,41	86,74	87,34	251,48	83,83	SANGAT BAIK
17	PPN Pekalongan	80,75	83,49	83,70	247,94	82,65	SANGAT BAIK
18	PPN Karangantu	81,67	82,19	82,31	246,17	82,06	SANGAT BAIK
19	PPS Belawan	80,86	82,09	82,33	245,28	81,76	SANGAT BAIK
20	PPN Tual	88,34	77,90	77,81	244,05	81,35	SANGAT BAIK
21	PPN Kwandang	89,62	76,85	77,33	243,80	81,27	SANGAT BAIK
22	PPN Sungailiat	90,30	75,01	75,01	240,32	80,11	SANGAT BAIK

Tabel 9. Capaian IK Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Bitung Tahun 2025

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pelabuhan lainnya, PPS Bitung menempati peringkat ke 10 dari 22 pelabuhan yang dilakukan penilaian indikator kinerjanya. Hal ini mengalami peningkatan daripada capaian pada tahun 2024 kemarin yang mendapatkan peringkat 19 dari 22 UPT. Peningkatan ini terjadi karena dari operator aplikasi SELARASKAN menginput realisasi program dan kegiatan tepat waktu. Selain itu juga kegiatan yang dilaksanakan dilakukan secara tertib dan bukti kegiatan tersebut terolah dengan baik.

Capaian IK nilai pengendalian lingkungan di PPS Bitung pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan yang



signifikan. Pada tahun 2024 memiliki target sebesar 30,10 dan telah terealisasi sebesar 67,02. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2025, maka mengalami peningkatan nilai sebesar 20,9 (31,18%). Peningkatan ini terjadi dikarenakan pada tahun 2025 ini terdapat penambahan program baik yang mandatory dan voluntary dan juga data dukung dari tiap kegiatan juga sudah lebih baik daripada tahun 2024.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target nilai pengendalian lingkungan di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 30,10 dan telah tercapai sebesar 85,81. Target indikator kinerja antara PPS Bitung dan PPS Kendari memiliki perbedaan dimana target PPS Bitung lebih tinggi dari PPS Kendari. Selain itu PPS Kendari memiliki nilai capaian yang lebih kecil daripada PPS Bitung, dengan selisih nilainya yaitu 2,11. Dari segi peringkat pun PPS Bitung memiliki peringkat yang lebih baik yaitu di peringkat 10 sedangkan PPS Kendari di peringkat 13 dari 22 UPT yang ada di Ditjen Perikanan Tangkap.

Keberhasilan capaian indikator kinerja tahun 2025 adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengendalian lingkungan yang telah diamanatkan oleh pusat berupa kegiatan mandatori dan kegiatan tambahan. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian nilai pengendalian lingkungan di PPS Bitung periode TW II tahun 2025 adalah penginputan realisasi kegiatan di aplikasi SELARASKAN secara tepat waktu dan mencantumkan data dukung yang lebih valid. Melakukan program rutin seperti menjaga kebersihan area pelabuhan, pengukuran, pemilahan dan pengangkutan sampah, pengukuran kualitas air, udara, penggunaan lampu hemat energi, penghematan energi dan air, pembuatan sumur resapan/biopori. Namun demikian masih ada beberapa kegiatan yang masih perlu dilakukan perbaikan, diantaranya adalah perlu menambahkan kegiatan pembersihan area pelabuhan terutama di area kolam pelabuhan dan perlu didokumentasikan; perlu dilakukan pengukuran volume sampah darat dengan melakukan penimbangan sampah darat; pemantauan kepatuhan tenan agar dibuat dalam bentuk laporan disertai dokumentasi; perlu melakukan sertifikasi dan surveillance ISO 14001; serta perlu dilakukan proses pengolahan sampah selain pembakaran.



Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp183.601.747,- atau sebesar 90,54% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp202.786.000,-. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,94. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih dari 1 sehingga dalam pencapaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PPS Bitung telah terjadi efisiensi sumber daya.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian nilai pengendalian lingkungan di PPS Bitung tahun 2025 adalah penginputan realisasi kegiatan di aplikasi SELARASKAN dan mencantumkan data dukung yang lebih valid. Selain itu program-program yang dilakukan bervariasi seperti menjaga kebersihan area pelabuhan, pengukuran, pemilahan dan pengangkutan sampah, pengukuran kualitas air, udara, penggunaan lampu hemat energi, penghematan energi dan air, pembuatan sumur resapan/biopori dan masih banyak kegiatan lainnya. Namun demikian perlu dilakukan monitoring terhadap poses penginputan data dukung pada aplikasi SELARASKAN supaya kejadian terlambatnya penginputan pada aplikasi bisa dihindari. Selain itu dilakukan kegiatan tata kelola lingkungan Pelabuhan, sosialisasi dan simulasi tanggap bencana kebakaran di lingkungan Pelabuhan.

IK 8. KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Cara menghitung indikator ini terhitung unik, mengingat penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan secara kumulatif antara realisasi di tahun 2023, 2024 dengan realisasi pada tahun 2025.

Capaian indikator kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 1.024 kapal yang terdiri dari 600

kapal di tahun 2023, 249 kapal di tahun 2024 dan 175 kapal di tahun 2025. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 950 kapal maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 107,79% (berkategori baik karena capaian antara 90-<110). Capaian realisasi kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Bitung pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Capaian IK Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan di PPS Bitung PPS Bitung Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH 2023	JUMLAH 2024	JUMLAH 2025
1	JANUARI	50	43	33
2	FEBRUARI	34	39	26
3	MARET	46	24	16
4	APRIL	16	25	15
5	MEI	34	12	8
6	JUNI	32	13	6
7	JULI	88	15	17
8	AGUSTUS	41	24	5
9	SEPTEMBER	88	15	11
10	OKTOBER	112	10	5
11	NOVEMBER	36	5	6
12	DESEMBER	23	24	27
TOTAL		600	249	175
JUMLAH TOTAL		1.024		

Capaian IK kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Bitung pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena perhitungan yang dilakukan merupakan akumulasi dari penjumlahan realisasi di tahun 2023, 2024 dan 2025. Selain itu juga disebabkan permohonan SKKP tahun 2024 yang menumpuk di akhir tahun sehingga proses penerbitannya dilakukan pada bulan Januari 2025.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target kapal perikanan izin



daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 2.333 kapal dan telah tercapai sebesar 3.639 kapal. Target indikator kinerja PPS Kendari lebih besar daripada PPS Bitung. Begitu pula dengan capaian indikator kinerja di PPS Kendari juga lebih besar daripada di PPS Bitung. .

Keberhasilan capaian indikator kinerja kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Bitung tahun 20245 adalah kesadaran dari pemilik kapal untuk memperpanjang izin kapalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta adanya penambahan petugas kelaikan di PPS Bitung. Selain itu juga komitmen petugas kelaikan yang siap untuk jemput bola kapal-kapal yang ingin memperpanjang izinnya untuk dilakukan pemeriksaan kelaikan kapal

Anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini tidak ada pada tahun 2025. Hal ini disebabkan bahwa tahun 2025 seluruh anggaran kelaikan dialihkan ke Direktorat KAPI Jakarta sehingga setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh petugas kelaikan ditanggung oleh Direktorat KAPI Jakarta. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung indikator kinerja ini.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di PSP Bitung pada periode tahun 2025 adalah dilakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring pengukuran dan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Penambahan jumlah petugas kelaikan juga merupakan salah satu faktor pencapaian realisasi di tahun 2025. Serta koordinasi dengan Direktorat KAPI terkait dengan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal di lingkup PPS Bitung maupun di wilayah binaan PPS Bitung.

IK 9. TINGKAT PEMENUHAN PERSYARATAN BEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut : (a) Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”; (b) Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”; (c) Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”; dan (d) Nilai $> 0,75$ s.d. 1,00 kategori “Sangat Baik”;

Capaian indikator tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan pada tahun 2025 adalah sebesar 0,58. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,26, maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 223,08% (berkategori istimewa karena capaian diatas 110%). Capaian indikator tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Capaian IK Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan pada Tahun 2025

No.	Jenis Kriteria Ukuran	Rata2 Nilai k	Kategori Pemenuhan Persyaratan	Tingkat Pemenuhan
1	s.d. 5 GT	0,75	Baik	s.d. 5 GT (Baik)
2	> 5 s.d. 30 GT	0,50	Cukup	> 5 s.d. 30 GT (Cukup)
3	>30 s.d. 100 GT	0,75	Baik	>30 s.d. 100 GT (Baik)
4	≥ 100 GT	0,50	Cukup	≥ 100 GT (Cukup)
5	≥ 100 GT Laut Lepas	0,50	Cukup	≥ 100 GT Laut Lepas (Cukup)
6	≥ 300 GT	0,50	Cukup	≥ 300 GT (Cukup)
Nilai Rata-Rata		3,50	0,58	
	Jumlah jenis kriteria range data (menyesuaikan dgn kondisi di pelabuhan)	6		

Berdasarkan tabel capaian tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan pada tahun 2025 diatas, pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan yang paling tinggi terjadi pada kapal perikanan ukuran s.d 5 GT dan antara >30 GT s.d 100 GT dengan nilai kepatuhan sebesar 0,75 atau



berkategori baik. Sedangkan untuk kapal perikanan lainnya memiliki nilai kepatuhan 0,5 dengan kategori nilai cukup. Rata-rata nilai tingkat pemenuhan persyaratan bekerja di PPS Bitung pada tahun 2025 memiliki kategori baik dengan status tingkat kepatuhan pada level 3 (diatas target yang ditentukan yaitu level 2). Pembobotan nilai ini sesuai dengan hasil pengamatan pada pemenuhan persyaratan bekerja di PPS Bitung sesuai dengan krulis/sijil dan SPB yang diterbitkan di PPS Bitung.

Indikator kinerja tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan ini merupakan IK baru pada tahun 2025, sehingga IK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target PPS Kendari sebesar 0,26 dan telah tercapai sebesar 0,58. Kondisi ini sama halnya dengan di PPS Bitung. Sehingga tidak terdapat perbedaan target maupun realisasi capaian antara PPS Kendari dan PPS Bitung.

Ketercapaian kepatuhan awak kapal perikanan didukung oleh beberapa faktor yang merupakan hasil sinergi dari beberapa aspek diantaranya meningkatnya pemahaman dan kesadaran awak kapal perikanan terkait dengan hak dan risiko, terdapatnya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan asuransi kepada awak kapal perikanan yang mendukung pemenuhan standar kerja, penerapan PKL (syarat penerbitan SPB) untuk membantu memastikan hak-hak dasar awak kapal perikanan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk awak kapal perikanan seperti BST, SKPI, buku pelaut, BSTF II.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kepatuhan awak kapal perikanan pada tahun 2025 adalah melakukan kerjasama dengan BP3 Bitung dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi awak kapal perikanan, melakukan fasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan awak kapal mendapat perlindungan asuransi kecelakaan dan kemarian, kerjasama dan koordinasi lintas sektor, serta

penyediaan layanan admin istrasi terpadu/pelayanan terpadu untuk penerbitan PKL, SPB dan dokumen ABK.

Realisasi anggaran untuk mendukung IK tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan adalah sebesar Rp223.569.172,- (98,52%) dari anggaran sebesar Rp226.929.000,-. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 2,26. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih dari 1 sehingga dalam tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan di PPS Bitung pada tahun 2025 telah terjadi efisiensi sumber daya.

IK 10. NILAI PM PEMBANGUNAN ZI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pengukuran dilakukan dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh PPS Bitung.

Indikator ini menjadi tanggungjawab dari tim kerja dukungan manajerial dan pada tahun 2025 ini memiliki target sebesar 75,5 (nilai).

Capaian indikator kinerja nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 94,19. Jika capaian tersebut



dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 75,5, maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 124,75% (berkategori istimewa karena capaian diatas 110%). Nilai ini didapatkan dari pengisian data dukung WBK oleh masing-masing pokja sesuai dengan format LKE yang baru.

Capaian kinerja nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 nilai PM Pembangunan ZI dengan target 80 telah terealisasi sebesar 94,08 atau sebesar 117,60%. Secara nilai telah meningkat sebesar 0,11.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 75,5 dan telah tercapai sebesar 83,57 (110,69%). Nilai target, capaian dan persentase antara PPS Bitung dan PPS Kendari berbeda dan PPS Bitung memiliki nilai target, capaian dan persentase yang lebih besar dari PPS Kendari.

Keberhasilan capaian indikator kinerja nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan yang telah dinilai WBK) di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah terdapatnya akselerasi dalam penyusunan kelengkapan dokumen yang secara intensif yang dilakukan oleh tim WBK yang telah dibentuk dan dibagi sesuai dengan komponen penilaian. Pemenuhan dokumen dilakukan oleh pegawai sesuai dengan SK yang dibentuk dan pemenuhan kelengkapan dokumen sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

Meskipun tidak didukung dengan alokasi anggaran, indikator ini dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan dilakukan untuk pelaksanaan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk pemenuhan dokumen WBK sesuai dengan tim pokja sesuai dengan SK yang telah diterbitkan. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya. Dengan tidak adanya dukungan anggaran maka tidak dapat dihitung efisiensinya.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada tahun 2025 adalah dilaksanakannya forum konsultasi publik dan pemantauan zona integritas. Selain itu juga dilakukannya penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai PPS Bitung.

IK 11. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula perhitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan.

Capaian indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 85% maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 117,65% (berkategori istimewa karena capaian diatas 110%). Capaian yang diperoleh mendapatkan nilai persentase 100% dikarenakan tidak adanya/tidak dilakukannya reviu oleh itjen pada TW III tahun 2025 sehingga tidak ada temuan/rekomendasi pada PPS Bitung yang harus ditindaklanjuti.

Capaian IK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Bitung pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 90,43% dikarenakan masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti salah satunya tentang pembiayaan sertifikat tanag yang belum tercantum pada RKAKL 2025 karena masih dilakukan proses perhitungan kebutuhan untuk penggantian nama pada sertifikat. Namun demikian pada tahun

2025 temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sehingga realisasi di tahun 2025 menjadi 100% (sudah ditindaklanjuti semua untuk rekomendasi dari Itjen).

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 85% dan telah tercapai sebesar 100% (117,65%). Target indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja antara PPS Kendari dan PPS Bitung memiliki target yang sama serta capaian indikator kinerja yang sama pula. Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2025 baik PPS Bitung dan PPS Kendari tidak menjadi lokasi pemeriksaan/audit/review oleh Itjen KKP sehingga tidak ada temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh keduanya.

Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah telah ditindaklanjutinya temuan dan rekomendasi yang belum sempat ditindaklanjuti pada tahun 2024 atas audit kinerja yang dilakukan pada bulan Juli 2024.

Pada tahun 2025, tidak ada alokasi anggaran mendukung indikator kinerja ini. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya. Sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan terkait dengan nilai efisiensi pada indikator kinerja ini.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah ditindaklanjutinya hasil audit dari Itjen serta dilakukannya monitoring dan evaluasi program kegiatan serta hasil pengawasan agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

IK 12. NILAI PM SAKIP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP PPS Bitung dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di PPS Bitung. Beberapa nilai, predikat dan kategori yang diperoleh dalam pengukuran SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai, Predikat dan Kategori Pengukuran SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Target pada tahun 2025 ini adalah 88 dan menjadi tanggungjawab dari tim kerja dukungan manajemen.

Capaian indikator Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 88,50. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 88 maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 100,57% (berkategori baik karena capaian antara 90-<110%). Capaian dengan nilai 88,50 memiliki predikat memuaskan dengan kategori A. Capaian tersebut didapatkan dari penjumlahan beberapa aspek penilaian, diantaranya adalah : aspek perencanaan kinerja dengan nilai 27,60; aspek pengukuran kinerja dengan nilai 26,10; aspek pelaporan kinerja dengan nilai 13,05; dan aspek evaluasi internal dengan nilai 21,75.

Capaian indikator Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP PPS Bitung pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 memiliki indikator yang berbeda dengan tahun 2025. Pada tahun

2024 indikator yang digunakan adalah nilai rekonsiliasi kinerja PPS Bitung. Sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan satu sama lainnya.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target Nilai PM SAKIP di PPS Kendari tahun 2025 sama dengan PPS Bitung yaitu 88. Namun demikian capaian di PPS Kendari lebih besar di PPS Bitung. Capaian di PPS Kendari Adalah 88,75 dan memiliki selisih nilai sebesar 0,25 dari capaian di PPS Bitung. Hal ini disebabkan bahwa pada beberapa aspek komponen penilaian SAKIP di PPS Kendari memiliki nilai yang lebih baik daripada PPS Bitung. Apabila dilihat secara peringkat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, PPS Bitung memiliki peringkat ke 13 sedangkan PPS Kendari memiliki peringkat ke 9 dari 29 satker di DJPT.

No.	Satker	Komponen				Nilai	Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		
1	Sekretariat	27,60	26,10	12,15	23,00	88,85	A
2	Dit. PSDI	27,60	26,10	13,80	23,00	90,50	AA
3	Dit. KAPI	30,00	30,00	15,00	21,25	96,25	AA
4	Dit. KP	27,60	27,00	13,80	23,00	91,40	AA
5	Dit. UPI	27,60	27,60	12,60	22,50	90,30	AA
6	Dit. PPN	27,60	27,60	11,85	22,50	89,55	A
7	BBPI Semarang	24,60	27,60	13,80	23,00	89,00	A
8	PPS Nizam Zachman	25,80	27,60	12,75	22,25	88,40	A
9	PPS Kendari	27,60	24,60	12,30	24,25	88,75	A
10	PPS Cilacap	30,00	30,00	15,00	25,00	100	AA
11	PPS Bungus	27,00	27,00	13,50	22,50	90,00	A
12	PPS Belawan	25,50	25,50	14,25	23,00	88,25	A
13	PPS Bitung	27,60	26,10	13,05	21,75	88,50	A
14	PPN Ambon	27,00	27,00	12,00	22,50	88,50	A
15	PPN Palabuhanratu	27,60	27,60	13,80	20,50	89,50	A
16	PPN Ternate	27,60	26,10	13,05	22,50	89,50	A
17	PPN Prigi	26,70	27,60	13,80	20,50	88,60	A
18	PPN Pemangkat	25,80	27,60	13,80	22,50	89,70	A
19	PPN Sibolga	27,60	24,00	13,80	23,00	88,40	A
20	PPN Tuai	27,60	27,60	12,60	21,00	88,80	A
21	PPN Kejawanan	27,60	26,70	12,60	21,75	88,65	A
22	PPN Pekalongan	26,10	26,10	13,80	23,00	89,00	A
23	PPN Brondong	27,60	27,60	13,50	20,50	89,20	A
24	PPN Tanjung Pandan	27,60	27,60	13,80	20,50	89,50	A
25	PPN Sungailiat	26,70	27,00	12,60	22,00	88,30	A
26	PPN Pengambengan	27,60	27,60	13,50	20,00	88,70	A
27	PPN Karangantu	27,60	27,60	13,80	20,75	89,75	A
28	PPN Kwandang	25,80	27,60	13,35	22,50	89,25	A
29	PPP Teluk Batang	27,60	27,00	13,50	21,75	89,85	A

Tabel 13. Nilai PM SAKIP lingkup Satker DJPT Tahun 2025

Keberhasilan capaian indikator kinerja PM SAKIP PPS Bitung pada tahun 2025 adalah pemenuhan aspek penilaian dari beberapa komponen yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja baik dari segi ketersediaan dokumen serta kualitas dari dokumen tersebut. Faktor pendukung lainnya Adalah adanya kepedulian dari seluruh pimpinan dan pegawai untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan di awal tahun dengan baik.

Pada tahun 2025, tidak ada alokasi anggaran mendukung indikator kinerja ini. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya. Sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan terkait dengan nilai efisiensi pada indikator kinerja ini.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Nilai PM SAKIP di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah penyusunan dokumen kinerja tahun 2025 mulai dari dokumen perencanaan (yang sudah disusun dan dipertahankan selama 5 tahun, memiliki standar yang baik yaitu indikator yang SMART, pohon kinerja, serta adanya Upaya yang patut dihargai dalam pemenuhan capaian perencanaan kinerja); pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment; pelaporan kinerja berupa penyusunan laporan yang menggambarkan kinerja dan dipertahankan dalam 5 tahun terakhir dan evaluasi kinerja serta dilakukannya monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja. Penilaian PM SAKIP tahun 2025 dilakukan secara bersama-sama melalui media zoom meeting pada 17 s.d 10 September 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran/tidak adanya anggaran yang mendukung kegiatan ini.

IK 13. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI PPS BITUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Pengukuran nilai IP ASN dilakukan dengan menggunakan 4 dimensi yaitu :

- a. Kualifikasi (diukur dari Riwayat pendidikan)
- b. Kompetensi (diukur dari Riwayat pengembangan kompetensi)
- c. Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kinerja PNS) dan
- d. Disiplin pegawai (diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN 006/BBM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan formula perhitungan sebagai berikut :

- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.
- Diklat 20JP dihitung secara proposional
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir

Indikator ini merupakan indikator yang menjadi tanggungjawab dari tim kerja dukungan manajemen. Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 adalah sebesar 89,09. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 87 maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 102,40% (berpredikat baik karena capaian antara 90% s.d 110%). Capaian yang diperoleh telah melebihi target yang telah ditentukan. Capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025



IP ASN 2025

Dashboard

Easlon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan pilih Nama Unit Kerja

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	SEKRETARAT DINAS PERIKANAN TANGKAP	91	22,86	91,44 %	29,63	74,08 %	25,44	84,8 %	4,97	99,4 %	82,9	TINGGI
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	54	22,59	90,36 %	29,99	74,97 %	25,56	85,2 %	4,94	98,8 %	83,08	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PERANGKAPAN IKAN	66	23,69	94,76 %	30,47	76,17 %	27,46	91,53 %	5	100 %	86,62	TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELATUSAHAN PERIKANAN	69	23,41	93,64 %	30,86	77,15 %	25,56	85,27 %	5	100 %	84,84	TINGGI
5	DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN	36	22,86	91,44 %	31,06	77,65 %	26,43	88,1 %	4,91	98,2 %	85,26	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	71	22,89	91,56 %	33,86	84,69 %	26,66	88,87 %	5	100 %	88,42	TINGGI
7	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MELAYAN	37	23,51	94,04 %	28,7	66,75 %	26,22	87,4 %	4,92	98,4 %	81,34	TINGGI
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHWAN JAKARTA	82	22,87	91,46 %	30	75 %	27,32	91,07 %	5	100 %	85,19	TINGGI
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	67	23,28	93,12 %	34,71	86,78 %	27,34	90,8 %	5	100 %	90,34	TINGGI
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	77	22,27	89,08 %	36,42	91,05 %	27,01	90,03 %	5	100 %	90,71	TINGGI
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNDUL	49	22,14	89,58 %	34,89	87,22 %	27,35	91,17 %	5	100 %	89,38	TINGGI
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	67	22,09	88,36 %	33,28	83,2 %	27,69	92,3 %	5	100 %	88,05	TINGGI
13	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SITILONG	49	23,67	94,68 %	33,75	84,47 %	26,63	88,77 %	5	100 %	89,09	TINGGI
14	PELABUHAN PERIKANAN MUSAUTARA AMBON	56	22,64	90,56 %	35,39	88,48 %	27	90 %	5	100 %	90,03	TINGGI
15	PELABUHAN PERIKANAN MUSAUTARA PALABUHANRATU	64	22,31	89,24 %	36,79	91,97 %	27,69	91,97 %	5	100 %	91,7	SANGAT TINGGI



Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Pada tahun 2024 capaian indeks profesionalnya sebesar 85,76. Peningkatan IP ASN sebesar 3,33 (3,88%). Kenaikan ini disebabkan sebagian besar pegawai yang telah mengikuti diklat/pelatihan/bimbingan teknis sehingga untuk nilai pengembangan pegawai mencapai nilai yang tinggi. Namun demikian masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti diklat/pelatihan/bimbingan teknis maupun belum mengupload sertifikat yang diperoleh melalui aplikasi myasn.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target indeks professional ASN di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 87 dan telah tercapai sebesar 90,24 (103,72%). Target indikator kinerja indeks profesionalitas ASN antara PPS Kendari dan PPS Bitung memiliki target yang sama. Namun demikian capaian indikator kinerja di PPS Kendari lebih besar daripada di PPS Bitung. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah jumlah pegawai yang dilakukan penilaian di PPS Kendari lebih banyak. Banyak pegawai PPS Kendari yang mengikuti pelatihan yang mendapatkan sertifikat 20 JP lebih banyak, serta nilai kinerja pegawainya lebih banyak yang mendapatkan nilai yang baik.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah banyak pegawai yang telah mengikuti diklat/pelatihan/bimbingan teknis dan sudah diupload di aplikasi MyAsn. Selain itu dengan tercapainya nilai kinerja organisasi istimewa, maka jumlah pegawai yang mendapatkan nilai sangat baik dan baik lebih banyak, sehingga untuk nilai pengembangan pegawai mencapai nilai optimal. Namun demikian masih terdapat beberapa pegawai yang sudah mengikuti pelatihan/diklat tetapi belum menginput sertifikat yang diperoleh kedalam aplikasi kepegawaian. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi/informasi agar beberapa pegawai yang belum mengikuti diklat/pelatihan/bimbingan teknis dapat mengikuti di sisa waktu sampai dengan pengukuran semester II berikutnya.

Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di PPS Bitung yang lebih baik adalah dengan dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap hasil IP ASN setiap pegawai di aplikasi serta mengingatkan kepada ASN di PPS Bitung untuk mengikuti diklat/pelatihan dan melaporkannya ke bagian kepegawaian PPS Bitung.

Anggaran pada yang digunakan untuk menunjang pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar Rp125.196.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp118.074.936,- (94,31%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan evaluasi pegawai dan capacity building pegawai PPS Bitung dalam rangka mendukung pelaksanaan Obvitnas di PPS Bitung. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,08, sehingga dalam pencapaian indikator kinerja ini telah terjadi efisiensi sumber daya. Berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan evaluasi pegawai dan capacity building pegawai 2025 :





Gambar 13. Kegiatan Evaluasi Pegawai dan Capacity Building mendukung Pelaksanaan Obvitnas di PPS Bitung

IK 14. PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengukuran dilakukan dengan melakukan persentase perbandingan antara nilai

rencana umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP dengan pagu pengadaan barang/jasa yang ada di PPS Bitung.

Target tahun 2025 sebesar 76% dan merupakan target yang menjadi tanggungjawab dari tim kerja dukungan manajerial. Periode pelaporan dilakukan setiap triwulan.

Capaian indikator persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 76% maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 131,58% (berkategori istimewa karena capaian diatas 110%). Capaian yang diperoleh mendapatkan nilai persentase 100% dikarenakan antara nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP memiliki nilai yang sama dengan pagu pengadaan barang/jasa di PPS Bitung. Capaian IKU ini pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung tahun 2025

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode PD / EC / DL)	Program 2 (Kode MB)	Program 3 (Kode WB)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Seluruh Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4.054.763,000	400.042,000	5.195.405,000		109.857,000	4.895.548,000	5.105.405,000	0	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2.500.368,000	1.726.822,000	4.227.190,000		173.083,000	4.054.137,000	4.227.190,000	0	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6.299.090,000	-	6.299.090,000		208.227,000	6.090.863,000	6.299.090,000	0	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGUNTU	5.026.187,000	-	5.026.187,000		216.547,000	4.809.640,000	5.026.187,000	0	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	463.513.809,000	-	463.513.809,000		457.069.402,000	6.444.407,000	463.513.809,000	0	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KIWANDANG	4.000.680,000	-	4.000.680,000		299.265,000	3.731.412,000	4.000.680,000	0	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	3.066.333,000	-	3.066.333,000		197.070,000	2.869.263,000	3.066.333,000	0	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4.391.285,000	-	4.391.285,000		684.480,000	3.706.805,000	4.391.285,000	0	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2.338.592,000	-	2.338.592,000		44.800,000	2.293.792,000	2.338.592,000	0	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1.160.369.582,000	-	1.160.369.582,000		1.156.224.800,000	4.144.782,000	1.160.369.582,000	0	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIKI	3.096.535,000	-	3.096.535,000		143.080,000	2.953.455,000	3.096.535,000	0	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2.174.331,000	2.026.728,000	4.201.059,000		149.001,000	4.052.058,000	4.201.059,000	0	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNDALAT	2.100.023,000	6.400,000	2.106.423,000		7.744,000	2.101.679,000	2.106.423,000	0	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1.017.526,000	2.082.335,000	3.099.861,000		201.385,000	2.898.476,000	3.099.861,000	0	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4.871.854,000	-	4.871.854,000		611.181,000	4.260.673,000	4.871.854,000	0	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	3.309.733,000	91.637,000	3.361.390,000		40.940,000	3.320.444,000	3.361.390,000	0	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2.856.681,000	-	2.856.681,000		56.248,000	2.800.432,000	2.856.681,000	0	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAUAN	3.045.800,000	2.346.994,000	5.392.814,000		444.154,000	4.948.700,000	5.392.814,000	0	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61.243.950,000	31.000,000	61.274.950,000		55.630.617,000	5.644.333,000	61.274.950,000	0	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGLU	2.358.509,000	-	2.358.509,000		0	2.358.509,000	2.358.509,000	0	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CLACAP	6.382.333,800	-	6.382.333,800		548.134,000	5.834.199,800	6.382.333,800	0	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	38.027.180,000	-	38.027.180,000		51.472.058,000	7.155.141,000	38.027.180,000	0	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	20.507.865,000	-	20.507.865,000		3.614.615,000	16.893.250,000	20.507.865,000	0	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1.295.136.398,938	16.790.025.184	1.275.926.424,000		1.282.098.940,210	23.887.583.790	1.275.926.424,000	0	100.00%

Capaian IKU persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 memiliki IKU yang berbeda baik dari segi nomenklatur, definisi, perhitungannya dan periode pelaporannya.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. IKU persentase rencana umum



pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Kendari tahun 2025 sama dengan di PPS Bitung, yaitu sebesar 76. Capaian indikator IKU persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung dan PPS Kendari memiliki nilai yang sama yaitu 100%. Hal ini dikarenakan baik PPS Bitung dan PPS Kendari sama-sama telah melakukan penginputan seluruh pengadaan di aplikasi SIRUP.

Realisasi IKU persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dilakukan sinkronisasi antara data RUP pada aplikasi SIRUP dengan RKAKL pada aplikasi SAKTI. Apabila terdapat perubahan pada RKAKL karena dilakukan revisi RKAKL baik revisi DIPA maupun revisi POK, maka secara simultan dilakukan penyesuaian data RUP pada aplikasi SIRUP sesuai dengan revisi RKAKL. Setelah dilakukan penyesuaian, dilakukan dokumentasi data RUP yang ada pada aplikasi SIRUP.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah selalu dilakukan penyesuaian data RUP pada aplikasi SIRUP apabila dilakukan perubahan/revisi RKAKL pada aplikasi SAKTI.

Tidak adanya anggaran serta realisasi anggaran yang mendukung IKU persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung pada tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu dampak dari adanya efisiensi anggaran yang dilakukan di seluruh K/L. Meskipun demikian dengan anggaran yang dilakukan blokir efisiensi, target IKU persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Bitung tetap tercapai.

IK 15. PERSENTASE PENGELOLAAN BMN DI PPS BITUNG

Merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase pengelolaan BMN di PPS Bitung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);

- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- e. Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Target tahun 2025 sebesar 81% dan merupakan target yang menjadi tanggungjawab dari tim kerja dukungan manajerial.

Capaian persentase pengelolaan BMN di PPS Bitung pada tahun 2025 yaitu sebesar 87,5. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 81 maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 108,02% (berkategori baik karena capaian antara 90-<110%). Capaian persentase pengelolaan BMN di PPS Bitung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawaban	Bobot	Nilai	Pilihan Jawaban	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tok Optimal	Petunjuk Penilaian	Dokumen/Data pendukung
1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN		100	87,5				
1	Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025		12,5	10				
a	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025	Y	5	5	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN		Penilaian dilakukan terhadap ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2025	Dokumen RKBMN Tahun 2025
b	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025	B	7,5	5	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. < 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10% s.d. < 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL < 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung persentase pengadaan dan pemeliharaan BMN dalam dokumen RKBMN Tahun 2025 yang diilustrasikan anggarannya dalam RKAKL Tahun 2025	- Dokumen RKBMN Tahun 2025 - Dokumen RKAKL Tahun 2025
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang	A	25	25	a. apabila persentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila persentase usulan PSP BMN > 50% s.d. < 80% c. apabila persentase usulan PSP BMN > 10% s.d. < 50% d. apabila persentase usulan PSP BMN < 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung persentase jumlah usulan penghapusan BMN terhadap NUP yang belum di PSP untuk belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III Tahun 2025. Data capaian PSP dapat diperoleh dari Biro Keuangan	- Data NUP yang belum di PSP - Data usulan PSP BMN - Data capaian PSP BMN dari Biro Keuangan
3	Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025	B	25	15	a. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 80% b. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 50% s.d. < 80% c. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset > 10% s.d. < 50% d. apabila tingkat penyelesaian revaluasi aset < 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung persentase jumlah usulan penghapusan BMN terhadap NUP BMN dengan Kondisi Rusak Berat sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Data capaian penghapusan BMN dapat diperoleh dari Biro Keuangan	- Data NUP BMN dengan kondisi Rusak Berat - Data usulan penghapusan BMN - Data capaian penghapusan BMN dari Biro Keuangan
4	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2025 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Pemakaian	A	25	25	a. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 50% s.d. < 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 10% s.d. < 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian < 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung persentase jumlah BMN hasil pengadaan Tahun 2025 yang telah dilengkapi BAST/Berita Acara Pemakaian BMN	- Data belanja modal Tahun 2025 - BAST/Berita Acara Pemakaian BMN perolehan Tahun 2025
5	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	A	12,5	12,5	a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu		Penilaian dilakukan terhadap ketepatan waktu penyusunan/pengiriman laporan BMN Semester I Tahun 2025 dan Tahunan (TA2024) - Jadwal penyampaian mengacu pada penyampaian LK unaudited (UAPPA-E1) sesuai PMK 222 Tahun 2016: - Semesteran: 26 Juli (tahun berjalan) - Tahunan: 15 Februari (tahun berikutnya)	- Laporan BMN Tahun 2024 dan Laporan BMN Semester I Tahun 2025

Tabel 16. Capaian IKU Persentase Pengelolaan BMN di PPS Bitung tahun 2025

Capaian persentase pengelolaan BMN pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur, perhitungan dari indikator kinerja ini.



Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target persentase pengelolaan BMN di PPS Kendari tahun 2025 sama dengan di PPS Bitung, yaitu sebesar 81. Capaian indikator persentase pengelolaan BMN di PPS Bitung memiliki capaian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan PPS Kendari. PPS Kendari memiliki capaian 100% sedangkan PPS Bitung hanya 87,5.

Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase pengelolaan BMN pada tahun 2025 adalah pelaksanaan pemenuhan dari parameter sudah dilakukan dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu untuk disempurnakan diantaranya berupa penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN, pemanfaata RK BMN dalam penyusunan RKA-K/L, penyelesaian PSP BMN, penyelesaian penghapusan BMN untuk kondisi BMN rusak berat, penertiban administrasi penggunaan BMN dengan BAST/BA Pemakaian serta penyusunan laporan BMN Tahunan secara tepat waktu.

Anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp738.882.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp738.034.2314,- (99,89%). Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,08nsehingga dalam pencapaian indikator kinerja ini telah terjadi efisiensi sumber daya.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada tahun 2025 adalah penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN, pemanfaata RK BMN dalam penyusunan RKA-K/L, penyelesaian PSP BMN, penyelesaian penghapusan BMN untuk kondisi BMN rusak berat, penertiban administrasi penggunaan BMN dengan BAST/BA Pemakaian serta penyusunan laporan BMN Tahunan secara tepat waktu.

IK 16. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan

anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Penghitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi.

Indikator ini merupakan indikator yang menjadi tanggungjawab dari tim kerja dukungan manajemen. Capaian indikator Nilai IKPA PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 85,10. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 92 maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 92,50 Capaian yang diperoleh masih belum melwati target yang telah ditentukan dan termasuk dalam kategori baik karena persentase realisasi/capaian antara 90% s.d <110%. Capaian realisasi Nilai IKPA PPS Bitung pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Capaian IK Nilai IKPA PPS Bitung Tahun 2025

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Filter

Sampai Dengan: Desember

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran</

Capaian IK Nilai IKPA PPS Bitung pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mendapatkan hasil yang lebih rendah. Pada tahun 2024 capaian Nilai IKPA PPS Bitung sebesar 95,24 sedangkan pada tahun 2025 sebesar 85,10. Terjadi penurunan capaian sebesar 10,14 (11,9%). Hal ini disebabkan pada tahun 2025 ini terdapat efisiensi anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal. Selain itu terdapat anggaran PHLN yang persentasenya



mencapai 81,66% dari total anggaran PPS Bitung yang belum terealisasi menyebabkan persentase penyerapan anggaran tidak maksimal. Selain itu pengelolaan UP dan TUP yang belum maksimal dikarenakan tidak adanya penggunaan KKP dalam pelaksanaan anggaran.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target nilai IKPA PPS Kendari tahun 2025 sebesar 92 dan telah tercapai sebesar 84,90 (92,28%). PPS Bitung memiliki target dan realisasi capaian yang lebih besar daripada PPS Kendari. Capaian indikator kinerja pada PPS Bitung dan Kendari sama-sama tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pada kedua Satker ini terdapat anggaran PLN dari AFD untuk Proyek Eco Fishing Port, dimana sebagian besar anggarannya tidak terserap maksimal.

Realisasi Nilai IKPA PPS Bitung pada tahun 2025 tidak mencapai target dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah besarnya penyerapan anggaran yang masih sangat rendah (20%) serta pengelolaan UP dan TUP yang kurang maksimal.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Nilai IKPA PPS Bitung yang lebih baik adalah dengan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dari para petugas keuangan yang ada dengan melakukan sosialisasi kepada para pengelola keuangan yang ada di PPS Bitung.

Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp24.019.704,- (99,99%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24.020.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan keuangan PPS Bitung. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 0,92. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai kurang dari 1 sehingga dalam pencapaian tingkat kinerja PPS Bitung tidak terjadi efisiensi sumber daya.

IK 17. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) DI PPS BITUNG

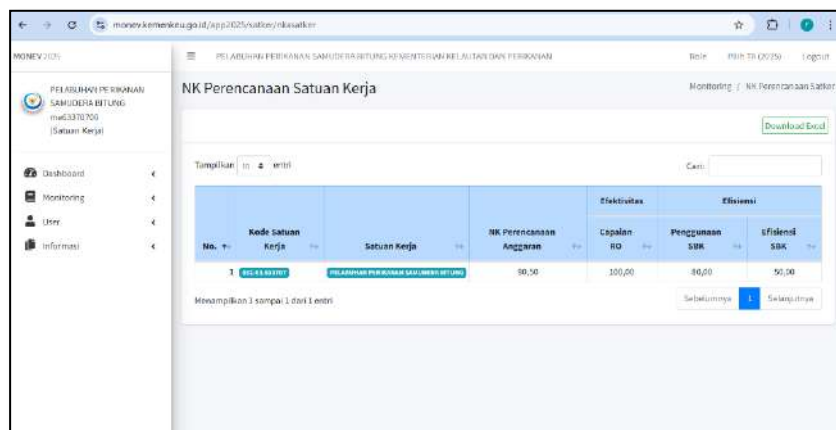
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. NKPA didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 18. Pembobotan pada indikator NKPA

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran di PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 90,50. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 71,5 maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 126,57%. Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran PPS Bitung pada tahun 2025 berdasarkan aplikasi monev kemenkeu dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 14. Capaian IK nilai kinerja perencanaan PPS Bitung Tahun 2025



No.	Kede Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK	Efisiensi Efisiensi SBK
1	SELASA BATU	PELAKSANAAN PERENCANAAN SAMUDERA BITUNG	90.50	100.00	80.00	50.00

Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) di PPS Bitung pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mendapatkan nilai yang lebih besar dengan selisih nilai sebesar 0,50.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target nilai kinerja perencanaan anggaran di PPS Kendari tahun 2025 sebesar 71,50 dan telah tercapai sebesar 903,57(130,87%). PPS Bitung dan PPS Kendari memiliki target kinerja yang sama namun demikian untuk realisasi capaian PPS Kendari memiliki realisasi yang lebih besar daripada PPS Bitung. Hal ini dikarenakan capaian RO PPS Kendari lebih besar daripada PPS Bitung.

Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran di PPS Bitung telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan capaian RO PPS Bitung bernilai 100, Penggunaan SBK pada RKAKL sebesar 80% dan nilai efisiensi dari SBK sebesar 50.

Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp16.435.000,- atau sebesar 100% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp16.435.000,-. Realisasi anggaran berupa pelaksanaan perjalanan dalam rangka penyusunan RKAKL Pagu Finalisasi tahun 2026.

Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,26. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih dari 1 sehingga dalam pencapaian tingkat kinerja PPS Bitung telah terjadi efisiensi sumber daya.

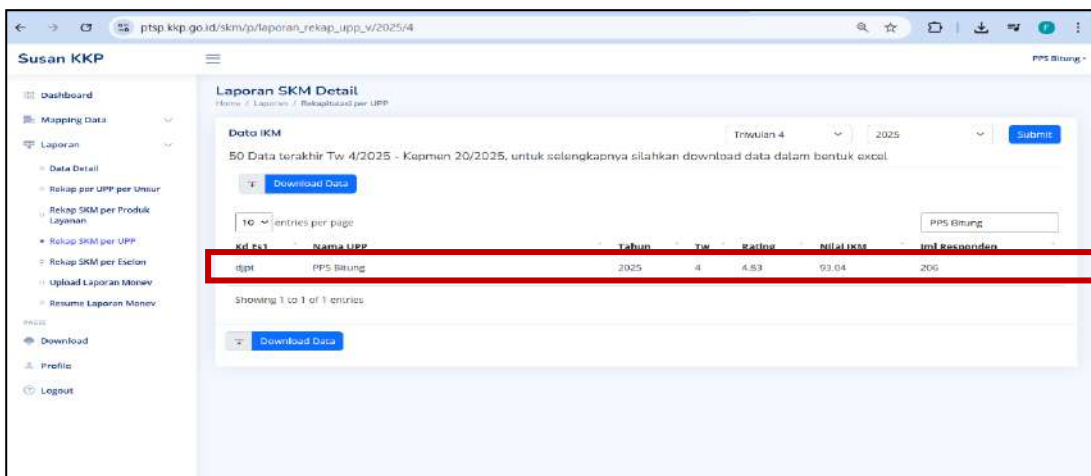
Kegiatan mendukung capaian indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran di PPS Bitung adalah pencapaian target rincian output dengan nilai yang baik/diatas target yang telah ditentukan. Penggunaan SBK dalam RKAKL dan melakukan efisiensi dari SBK.

IK 18. NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggaraan pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan pelayanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Capaian indikator nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar 93,04. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 88,5 maka persentase capaian tersebut adalah sebesar 105,13% (berkategori baik karena capaian bernilai 90- 110%). Capaian realisasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 15. Capaian IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung Tahun 2025



Kd RKT	Nama UPP	Tahun	TW	Rata-rata	Nilai IKM	Int Responden
0001	PPS Bitung	2025	4	4.53	93.04	206



Capaian IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 memiliki nilai capaian yang lebih besar. Target IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung pada tahun 2024 ini sebesar 91,26. Selisih nilai SKM ini adalah 1,78 (1,95%). Jumlah responden pada tahun 2025 lebih banyak daripada tahun 2024. Tahun 2025 sebanyak 206 responden sedangkan tahun 2024 sebanyak 110 orang/responden.

Perbandingan dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan capaian antara PPS Bitung dengan PPS Kendari. Target nilai kinerja nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Kendari tahun 2025 sebesar 88,5 dan telah tercapai sebesar 92,54 (104,56%). PPS Bitung dan PPS Kendari memiliki target kinerja yang sama namun demikian untuk capaian PPS Bitung memiliki realisasi yang lebih besar daripada PPS Kendari. Hal ini dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan di PPS Bitung lebih besar daripada di PPS Kendari.

Realisasi capaian IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta perbaikan kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus sehingga kepuasan pengguna jasa tercapai. Namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan baik di bidang pelayanan dan juga sarana dan prasarana di lingkup PPS Bitung. Selain itu juga adanya peran aktif dari pengguna jasa sebagai responden dan petugas pelayanan yang melakukan pendampingan pada saat pengisian kuisioner SKM melalui aplikasi SISUSAN KKP.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian target IK nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung pada tahun 2025 adalah pelaksanaan pelayanan publik yang terus ditingkatkan dan selalu berusaha untuk tepat waktu dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa. Mengarahkan dan bersikap ramah kepada pengguna jasa. Serta memberikan penjelasan kepada pengguna jasa apabila ada proses yang belum dimengerti oleh pengguna jasa. Komitmen dari petugas pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan prima dan terbaik sesuai dengan moto PPS Bitung.

Realisasi anggaran untuk mendukung IKU Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar Rp62.234.440,- (99,05%) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp62.830.000,-. Realisasi berupa pembuatan bahan informasi dan publikasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di lingkup PPS Bitung serta pelaksanaan rapat sosialisasi SKM yang dilaksanakan tiap triwulan.

Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika hasil perbandingan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1 maka terjadi efisiensi. Begitu juga sebaliknya apabila hasil perbandingan memiliki nilai kurang dari 1 maka tidak terjadi efisiensi. Dari hasil perbandingan persentase capaian dengan persentase realisasi didapat nilai sebesar 1,06. Hasil yang didapatkan mendapatkan nilai lebih dari 1 sehingga dalam pencapaian tingkat kinerja PPS Bitung telah terjadi efisiensi sumber daya.



Gambar 16. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat TW IV Tahun 2025 di PPS Bitung

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU), PPS Bitung melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp69.764.210.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Rp56.572.247.000,-)
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Rp9.696.000,-)
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Rp13.182.267.000,-)

Dari pagu anggaran tersebut diatas, terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp883.865.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp68.880.345.000,-. Realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada tahun 2025 adalah sebesar Rp14.156.467.770,- (20,55% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan/diluar anggaran yang diblokir). Realisasi ini masih relative kecil dikarenakan terdapat pagu anggaran yang bersumber dari PHLN untuk kegiatan AFD/Proyek Eco Fishing Port yang mana pada tahun 2025 masih berada dalam tahap perencanaan kegiatan fisik serta masih menunggu arah kebijakan dari DJPT Pusat. Realisasi anggaran jika dilihat per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Anggara PPS Bitung Tahun 2025 Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	PAGU RKAKL	NILAI EFISIENSI ANGGARAN	PAGU YANG DAPAT DIGUNAKAN	REALISASI	% thd c	% thd e
a	b	c	d	e	f	G	h
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	56.572.247.000	719.681.000	55.852.566.000	1.344.751.137	2,37	2,41
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	9.696.000	-	9.696.000	9.696.000	100	100
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.182.267.000	164.184.000	13.018.083.000	12.811.716.633	97,18	98,41
JUMLAH		69.764.210.000	883.865.000	68.880.345.000	14.156.467.770	20,29	20,55



BAB I V

PENUTUP



LATAR BELAKANG

Dengan dukungan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp69.764.210.000,- telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp14.156.467.770,- atau sebesar 20,55%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada tahun 2025 melalui pencapaian target IKU yang diinput dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Kinerja KKP yaitu Kinerjaku, diperoleh nilai kinerja organisasi sebesar 115,23 dari 18 IK yang dilakukan penilaiannya pada Tahun 2025. Dari 18 IK tersebut, 17 IK telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2025 dan mencapai persentase diatas 100%. Meskipun demikian terdapat 1 IK yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat 11 IK yang mendapatkan predikat istimewa (berwarna biru dan persentase diatas 110%) dan 7 IK yang mendapatkan predikat baik (berwarna hijau dan persentase 90 s.d <110%).

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Tahun 2025, secara umum kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung menunjukkan tren yang positif dan progresif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja pada Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 nilai kinerja organisasi sebesar 116,41. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,18. Namun secara nilai capaian tiap IKU memiliki nilai capaian dan persentase yang lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Meskipun demikian pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dan selektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Perlu dilakukan

beberapa hal seperti peningkatan sinergi antarunit/antar tim kerja, memberikan dukungan terhadap SDM agar lebih kompeten, serta tetap beradaptasi terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, tetap diupayakan untuk pelaksanaan ketercapaian target-target yang telah ditentukan di awal tahun 2025.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pembahasan pada Bab III, beberapa saran perbaikan untuk peningkatan kinerja guna mencapai target tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian program, kegiatan dan anggaran yang mendukung ketercapaian indikator kinerja serta pelaksanaan pencapaian target kinerja tahun 2026;
2. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran tahun 2026 dengan memperhatikan realisasi tahun 2025 serta kebijakan untuk tahun 2026.
3. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang urgent sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian target dan pelayanan terhadap pengguna jasa dengan lebih baik;

TINDAKLANJUT SARAN PADA LKJ TW III TAHUN 2025

Tindaklanjut yang dilakukan atas saran yang terdapat pada Laporan Kinerja TW Ili Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja;





2. Telah dilakukan pengaduan yang bersumber dari kelebihan PNBP Npn SDA dan juga adanya relaksasi anggaran pada bulan November 2025 yang digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan public di PPS Bitung.
3. Penyusunan RKAKL 2026 dimana memperhatikan realisasi tahun 2025, kebutuhan dan kebijakan untuk tahun 2026.
4. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian target dan pelayanan terhadap pengguna jasa dengan lebih baik.

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan secara selektif dan cermat untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan prioritas Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota serta pelaksanaan PNBP Pasca Produksi di PPS Bitung.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Makkasau**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

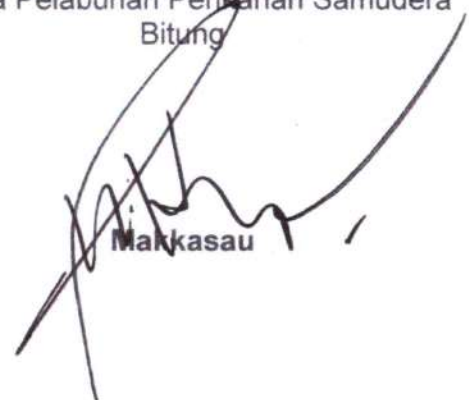
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Bitung


Makkasau

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	2.391,629
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)	51.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	86
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	97
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	60
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	50
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	950
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
Program Dukungan Manajemen				
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	88,5

Data anggaran :

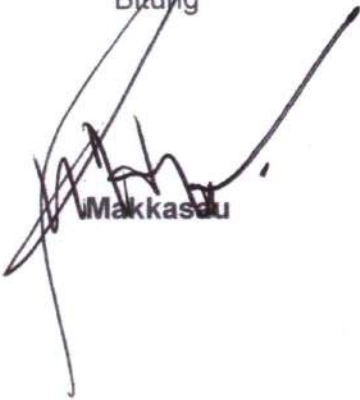
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	56.572.247.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	9.696.000
3.	Dukungan Manajemen internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.182.267.000
Total Anggaran Tahun 2025		69.764.210.000

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Bitung


Makkasau





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORATJENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

AERTEMBAGA SATU AERTEMBAGA KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36775 , FAKSIMILE (0438) 36775
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ppsbitung@kkp.go.id

Nomor : B.106/PPS.BTG/RC.610/I/2026 19 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pelaporan Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
Periode Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
di Jakarta

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan rekapitulasi perhitungan capaian kinerja periode tahun 2025 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung memiliki 18 indikator kinerja yang terdiri dari 9 IKU dan 9 IKM. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan pada awal Januari 2026, didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Capaian 2025	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	2.391,629	4.850,97	120,00
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat	02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (ton)	51.000	88.655,50	120,00
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal dan Bertanggung Jawab	03	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	100	100	100,00
		04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	86	97,17	112,99
		05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	97	100	103,09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Capaian 2025	%
		06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	60	72	120
		07	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	50,00	87,92	120,00
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	08	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	950	1.024	107,79
		09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	0,26	0,58	120,00
5	Terwujudnya Layanan Dukungan manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	75,5	94,19	120,00
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (%)	85	100	117,65
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (nilai)	88	88,50	100,57
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	87	89,09	102,40
		14	Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	76	100	120,00
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (persen)	81	87,50	108,02
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	92	85,10	92,50
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	71,5	90,50	120
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	88,50	93,04	105,13

2. Telah dilakukan penginputan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung tahun 2025 pada aplikasi kinerjaku (<http:kinerjaku.kkp.go.id>). Berdasarkan hasil penginputan tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung mendapatkan nilai kinerja organisasi sebesar 115,23 atau berpredikat istimewa (terlampir).



3. Adapun data dukung capaian setiap indikator kinerja, laporan kinerja dan evaluasi rencana aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung tahun 2025 diunggah pada link google drive yang telah disediakan oleh DJPT.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Makkasau

Tembusan :
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap